

2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH

L K I P



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Pattimura Nomor 1, Uritetu, Sirimau, Ambon, Maluku 97124

Telepon (0911) 353377 Faksimile (0911) 353377

Laman: www.malukuprov.go.id Pos-el: inspektorat@malukuprov.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ambon, Februari 2025

INSPEKTUR DAERAH


Drs. JASMONO, M.Si.,CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19741226 199412 1 003

Executive Summary

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2024 merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan serta hasil yang dicapai sesuai Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan mandat yang di amanatkan dalam PERMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas kinerja ini melaporkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang telah diperjanjikan.

Secara umum seluruh kegiatan yang dilaksanakan ini didasarkan pada penjabaran Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang terangkum di dalam visi menengah Provinsi Maluku adalah **“Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”**. Untuk mewujudkan Visi dilaksanakan dalam 3 (tiga) misi Jangka Menengah Provinsi Maluku yang terkait dengan Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

Kode	Misi
M2	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau
M5	Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata
M3	Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi

Beradasrkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku, Selanjutnya dijabarkan kedalam tujuan masing – masing bidang yang melahirkan 6 (*Enam*) sasaran stratejik sesuai Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Perubahan Maluku Tahun 2019 – 2024, yaitu :

Kode	Sasaran Strategis
S1	Meningkatnya sumberdaya manusia dan daya saing Pendidikan Vokasi
S2	Meningkatnya Akses layanan Pendidikan Menengah dan khusus secara murah dan merata
S3	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang berkualitas dan merata
S5	Meningkatnya identitas budaya Maluku melalui Pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
S6	Meningkatnya tata kelola organisasi Penyelenggara Pendidikan dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan Pendidikan

Berdasarkan sasaran stratejik diatas selanjutnya dijabarkan kedalam 7 (*Delapan*) program andalan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengembangan Kebudayaan
5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
6. Program Pembinaan Sejarah
7. Program Pelestarian dan Pengeloan Cagar Budaya

Selanjutnya program – program tersebut di atas selama tahun 2024 diimplementasikan dengan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar **Rp. 1.240.379.112.161** yang tertuang dalam **7** Program, **17** Kegiatan dan **86** Sub-Kegiatan baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dapat dirincikan sebagai berikut :

No	NAMA PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8	29
2	Program Pengelolaan Pendidikan	3	48
3	Program Pendidik dan Tenaga kependidikan	1	1
4	Program Pengembangan Kebudayaan	2	2
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1	3
6	Program Pembinaan Sejarah	1	1
7	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1	2
Total		17	86

Daftar Isi

<i>Executive Summary</i>	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	5
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	7
1.4. SUMBER DAYA	9
a. Sumber daya Manusia.....	9
b. Aset tetap.....	10
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN	10
1.6. ISU STRATEGIS	11
BAB. II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
2.1. RENCANA STRATEGIS	13
a. Visi.....	13
b. Misi	14
c. Tujuan	14
d. Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan renstra	15
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	24
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
3.2. REALISASI ANGGARAN	75
BAB. IV. PENUTUP.....	78
4.1. TINJAUAN UMUM	78
4.2. TINJAUAN KHUSUS	78
4.2. SARAN DAN TINDAK LANJUT	80
LAMPIRAN	82

Daftar Tabel

Tabel. 1.	Data Pegawai berdasarkan Gol. Ruang	9
Tabel. 2.	Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Tabel. 3.	Data Pegawai Per Kabupaten/Kota	9
Tabel. 4.	Data Nilai Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Per 31 Desember 2024	10
Tabel. 5.	Tujuan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku 2019-2024	15
Tabel. 6.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2024	17
Table. 7.	Sasaran Strategis (SS1) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Tujuan Strategis	22
Tabel. 8.	Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2024	25
Tabel. 9.	Gradasi Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel. 10.	Capaian Sasaran Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Pendidikan Vokasi	29
Tabel. 11.	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 antara Tahun 2023 dan Tahun 2024	30
Tabel. 12.	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2023 dan 2024 serta Tahun Akhir Periode Renstra.....	30
Tabel. 13.	Data Siswa SMK yang Aktif dalam Pembelajaran Teaching Factory Provinsi Maluku Tahun 2024.....	32
Tabel. 14.	Persentase SMK yang memiliki LSP Provinsi Maluku Tahun 2024	34
Tabel. 15.	Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran Meningkatnya Sumberdaya manusia dan daya saing Pendidikan Vokasi.....	35
Tabel. 16.	Capaian Sasaran Meningkatnya akses Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus secara berkualitas dan merata.....	36
Tabel. 17.	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2 antara Tahun 2023 dan Tahun 2024	38
Tabel. 18.	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2023 dan 2024 serta Tahun Akhir Periode Renstra.....	39
Tabel. 19.	Data APK SMA/SMK/SMLB/Sederajat Provinsi Maluku Tahun 2024	42
Tabel. 20.	Realisasi APM SMA/SMK/SMLB/Sederajat Provinsi Maluku Tahun 2024	43
Tabel. 21.	Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi pada jenjang SMA Provinsi Maluku Tahun 2024	45
Tabel. 22.	Jumlah Penduduk usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi pada jenjang SMK Povinsi Maluku Tahun 2024.....	46

Tabel. 23.	Jumlah Penduduk Disabilitas usia 4-18 Tahun yang berpartisipasi Pada Jenjang SLB Provinsi Maluku Tahun 2024	47
Tabel. 24.	Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus secara Berkualitas dan Merata	53
Tabel. 25.	Capaian sasaran Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang Merata.....	56
Tabel. 26.	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3 antara Tahun 2023 dan Tahun 2024	57
Tabel. 27.	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2023 dan 2024 serta Tahun Akhir Periode Renstra.....	57
Tabel. 28.	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional pada Jenjang Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Maluku Tahun 2024	59
Tabel. 29.	Rasio Ketersediaan Guru terhadap siswa Menengah Provinsi Maluku Tahun 2024	60
Tabel. 30.	Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang merata.....	61
Tabel. 31.	Capaian Sasaran Meningkatnya Identitas Budaya Maluku melalui Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	62
Tabel. 32.	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 5 antara Tahun 2023 dan Tahun 2024	62
Tabel. 33.	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2023 dan 2024 serta Tahun Akhir Periode Renstra.....	63
Tabel. 34.	Jumlah Cagar Budaya yang di lestarikan Provinsi Maluku Tahun 2024	64
Tabel. 35.	Jumlah event Festival Seni Daerah yang dilaksanakan Provinsi Maluku 2024	65
Tabel. 36.	Jumlah Pelaku Budaya Tahun 2024	66
Table. 37.	Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran Meningkatnya Identitas Budaya Maluku Melalui Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	66
Tabel. 38.	Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Penyelenggara Pendidikan dan Manajemen Pendukung tugas Pembantuan Urusan Pendidikan.....	68
Tabel. 39.	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 5 antara Tahun 2023 dan Tahun 2024	69
Tabel. 40.	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2023 dan 2024 serta Tahun Akhir Periode Renstra.....	69
Tabel. 41.	Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Penyelenggara Pendidikan dan Manajemen Pendukung tugas Pembantuan Urusan Pendidikan.....	71

Tabel. 42.	Capaian Sasaran Meningkatnya Layanan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	72
Tabel. 43.	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 6 antara tahun 2023 dengan tahun 2024.....	73
Tabel. 44.	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 6 antara tahun 2023 dengan tahun 2024 serta Tahun Akhir periode Renstra	73
Tabel. 45.	Anggaran dan Realisasi Penunjang Sasaran Meningkatnya Layanan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75
Tabel. 46.	Realisasi Anggaran Tahun 2024	76
Tabel. 47.	Capaian Penilaian Kinerja Tahun 2024	80

Daftar Gambar

Gambar. 1.	Lulusan SMK yang diterima di Dunia Usaha dan Dunia Industri Provinsi Maluku Tahun 2024.....	33
Gambar. 2.	Perkembangan LSP Provinsi Maluku Tahun 2021-2024	35
Gambar. 3.	Realisasi APK SMA/SMK/SLB/Sederajat Provinsi Maluku Kelompok Usia 16-18 Tahun.....	42
Gambar. 4.	APM SMA/SMK/SMLB/Sederajat Provinsi Maluku	44
Gambar. 5.	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Provinsi Maluku	49
Gambar. 6.	Realisasi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) usia > 15 tahun Provinsi Maluku	50

Pendahuluan

Bab I

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Maluku, tantangan yang sementara dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku adalah bagaimana menyediakan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Maluku, agar dapat meningkatkan proporsi penduduk yang berpendidikan lebih tinggi atau peningkatan sumber daya manusia serta masyarakat yang berbudaya. Kondisi ini antara lain terlihat dari, masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur. profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yang belum merata, Terbatasnya aparatur yang berpengalaman. Hal ini pada akhirnya berakibat pada mutu pelayanan pendidikan dan kebudayaan kita yang masih belum optimal, dan akibat dari mutu pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang rendah berdampak pada kualitas Kepala Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta peserta didik dan para pelaku budaya. Terbatasnya data dan informasi pendidikan dan kebudayaan juga. juga masih terlihat dari adanya kesenjangan partisipasi pendidikan antara kelompok masyarakat di perkotaan dan pedesaan, antara penduduk miskin dan penduduk yang sudah mampu. Pendidikan kejuruan yang berfungsi sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat, juga belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam mengembangkan layanan Pendidikan dan kebudayaan dalam konteks merespon permasalahan pelayanan juga berangkat dari dua paradigma dasar yaitu :

1. Paradigma Pendidikan Untuk Perkembangan, Pengembangan dan Atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B)

PuP3B yang merupakan terjemahan dari *Education for Sustainable Development* (EfSD) merupakan paradigma pendidikan baru yang diprakarsai oleh PBB melalui UNESCO dengan tujuan agar pendidikan menghasilkan manusia berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi-generasi yang akan datang (keberlanjutan intergenerasional).

Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan Planet Bumi, dan bahkan keberlanjutan keseluruhan alam semesta. Paradigma ini pun menghendaki keberlanjutan kesehatan lingkungan dengan cara menjaga keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem, melestarikan komponen-komponen dalam ekosistem, dan menjaga keseimbangan interaksi antar komponen dalam ekosistem. Selain itu, setiap bentuk intervensi manusia atas keseimbangan ekosistem baik itu melalui upaya-upaya pengembangan yang dosis intervensinya rendah sampai dengan pembangunan yang dosis intervensinya tinggi harus dilakukan dalam batas daya dukung lingkungan, tidak mengancam keberlanjutan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan menghemat penggunaan sumberdaya alam yang tak dapat diperbaharui.

PuP3B juga menghendaki keberlanjutan keseimbangan lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, sebagai bagian integral dari ekosistem. Dengan kata lain, PuP3B menghendaki manusia yang melestarikan keberlanjutan peradabannya tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistemnya. PuP3B hanya akan terwujud apabila paradigma pembelajaran sepanjang hayat yang berpusat pada peserta didik, yang mengidamkan subyek pembelajar yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan

berkewirausahaan, betul-betul dilaksanakan. Tanpa adanya manusia pembelajar yang seperti itu, sulit sekali PuP3B bisa terwujud. PuP3B juga menghendaki bahwa pendidikan untuk semua yang inklusif dan tanpa diskriminasi betul-betul dilaksanakan, karena adanya sebagian masyarakat yang tidak menjadi pembelajar sepanjang hayat akan menjadi sumber ketidakberlanjutan keseimbangan ekosistem.

Dalam perspektif PuP3B, pendidikan bisa menjadi masalah, bisa juga menjadi solusi. Pendidikan menjadi masalah jika pendidikan tidak mengadopsi paradigma PuP3B, sehingga menghasilkan manusia yang tidak peduli akan keberlanjutan keberadaan dirinya, komunitas masyarakatnya, sistem sosialnya, sistem ekonominya, kebudayaannya, dan lingkungan alamnya. Namun pendidikan bisa menjadi solusi jika pendidikan yang dilakukan dapat membangun kesadaran kritis tentang PuP3B. Selama ini ada paradoks. Semakin orang terdidik, semakin menjadi masalah, karena tingkat konsumsinya cenderung meningkat dan dilakukan dengan cara-cara yang boros sumberdaya dan merusak lingkungan.

Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Apapun yang dilakukan manusia terhadap ekosistem pasti akan ada akibatnya. Pada akhirnya muncul kesadaran bahwa bumi merupakan satu sistem yang “tertutup”. Ketika sumberdaya alam habis, maka sumberdaya alam itu tidak akan bisa diperoleh dari planet lain. Substansi lain yang harus ada dalam PuP3B adalah pandangan dan kepercayaan terhadap masa depan dan berpikir holistik dengan visi jangka panjang.

Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggung-jawab sosial. Bumi adalah habitat semua manusia, karena itu nilai keadilan, tanggung-jawab sosial, dan demokrasi

harus dikembangkan. Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan dan semua bentuk intervensi terhadap lingkungan termasuk pembangunan. Ada dua aspek pembelajaran dalam PuP3B. Aspek pertama adalah pembelajaran individual, yang menyangkut wawasan, nilai-nilai, dan kemampuan individual. Aspek kedua adalah pembelajaran sosial, yang menyangkut pengembangan modal sosial dan masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Dengan demikian, pembelajaran akan menumbuhkan kemampuan kerjasama pada berbagai skala ekosistem, sehingga bisa melakukan adaptasi berlanjut pada skala ekosistem.

2. Paradigma Pendidikan membangun kebudayaan

Pendidikan mengandung aspek dalam proses membangun sebuah peradaban kebudayaan, baik secara jasmaniah dan rohaniah. Proses budaya tentunya tidak lepas dari proses pembelajaran akan sebuah kearifan lokal daerah yang melekat kuat pada suatu daerah. Pembangunan pendidikan dalam mendongkrak nilai kearifan yang beredar dalam suatu daerah membutuhkan penanganan yang komprehensif dan sebagai langkah revitalisasi dalam menjaga multikultural keberagaman budaya. Untuk itu pembangunan jasmaniah dan rohaniah perlu untuk dijadikan pedoman dengan dasar pendidikan yang kuat. Pola pembangunan jasmaniah budaya harus bersinergi dengan pembangunan rohaniah budaya. Kedua hal ini penting untuk dikembangkan dengan dasar pondasi pengembangan nilai-nilai kearifan lokal melalui dunia pendidikan.

Makna pembelajaran melalui pendidikan juga harus menanamkan karakter pembelajaran mengenai pengelolaan aset budaya yang meliputi pengelolaan kesenian dan kebudayaan daerah secara jasmaniah dengan tujuan meningkatnya perlindungan/pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan

dengan mengacu pada budaya daerah. Penjelasan lain mengenai peran dunia pendidikan dalam usaha menunjang pembangunan rohaniyah budaya adalah melalui penanaman karakter berbasis budaya dan nilai-nilai sejarah agar setiap individu diharapkan menjadi diri yang berbudaya dan mampu mengimplementasikan karakter berbudaya demikian dalam kehidupan masyarakat.

Untuk itu perlu di lakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah di laksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku selama tahun 2024. Instrumen pengevaluasinya melalui laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP disusun dalam rangka menciptakan aksesibilitas, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku 2019 – 2024 dan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dimana bidang Pendidikan dan Kebudayaan diarahkan pada terselenggaranya pelayanan pendidikan dan Kebudayaan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat Maluku.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain sebagai derivasi dari RPJMD dan RENSTRA maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku disusun untuk tetap menjaga sinergitas antara rencana target dan realisasi indikator kinerja yang telah di tetapkan.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di atur dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku

sebagai dampak pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan serta tugas pembantuan yang di tugaskan kepada Daerah Provinsi. Adapun kedudukan, Tugas Pokok, fungsi susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

b. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan serta tugas pembantuan yang di tugaskan kepada Daerah Provinsi.

c. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menyelenggarakan Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di Bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan bidang kebudayaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan dan Bidang kebudayaan;
4. Pembinaan teknis di bidang Pendidikan dan bidang kebudayaan;
5. Pembinaan cabang Dinas dan/atau unit pelaksana teknis dinas;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

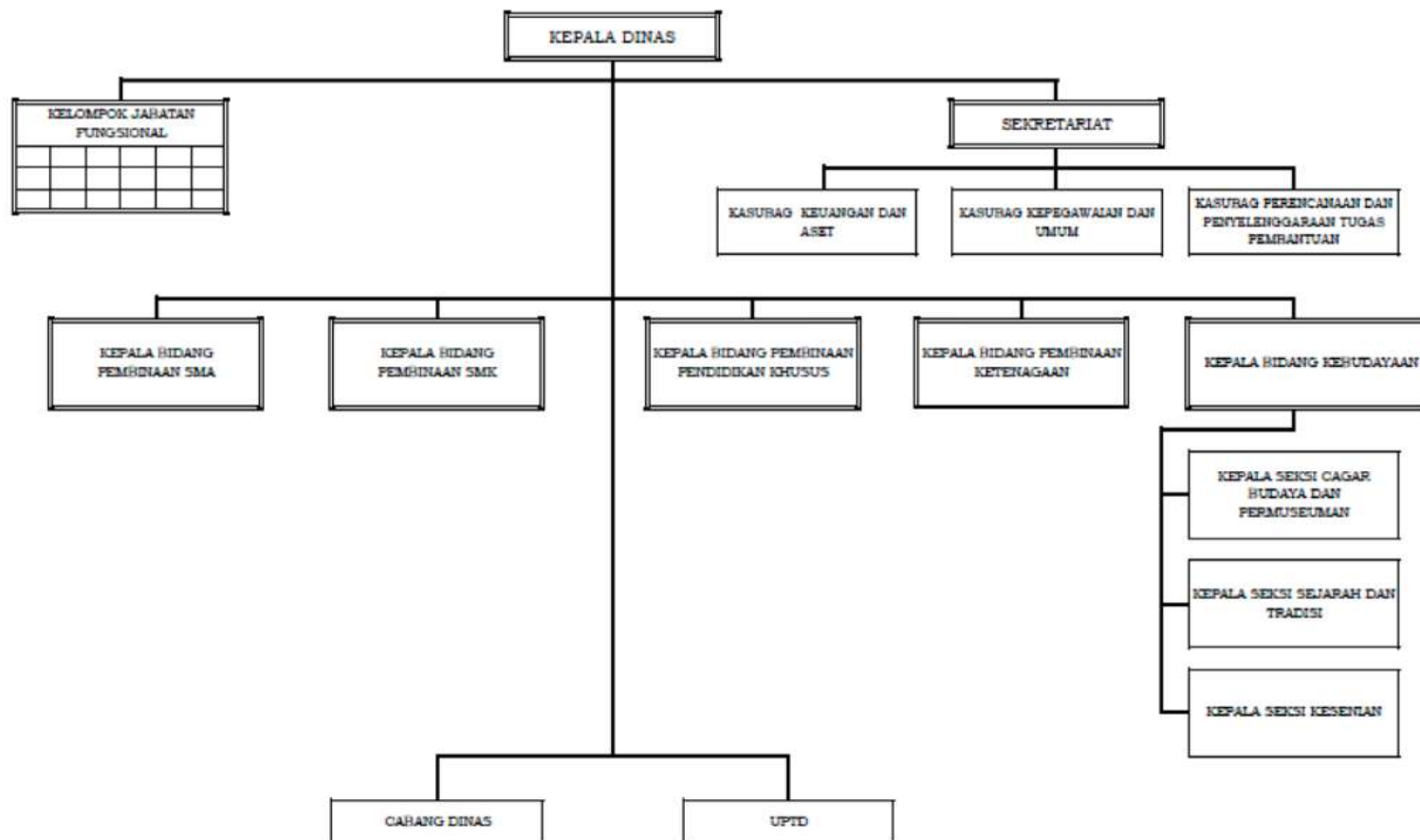
1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat Dinas, Terdiri Atas :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - b. Sub Bagan Kepegawaian dan Umum
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
- 3) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas
- 4) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
- 5) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus
- 6) Bidang Kebudayaan
- 7) Bidang Pembinaan Ketenagaan
- 8) Cabang Dinas
- 9) Unit Pelaksana Teknis Daerah

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



1.4. SUMBER DAYA

a. Sumber daya Manusia

Berdasarkan Bezetting Pegawai Keadaan 31 Desember 2024, jumlah PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebanyak 7.230 orang yang terdiri dari :

1. Golongan

Tabel 1
Data Pegawai berdasarkan Gol. Ruang

Jumlah Pegawai	Pangkat Golongan Ruang																
	IV/ e	IV /d	IV /c	IV /b	IV /a	III /d	III /c	III/ b	III/ a	II /d	II /c	II /b	II /a	I /d	I /c	I /b	I /a
7.230	-	-	26	74 2	94 2	1.3 41	825	338	2.68 6	10 0	96	88	35	7	2	2	-
	1.710					5.190				319				11			

2. Tingkat Pendidikan

Tabel 2
Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan									
	S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA/ Sederajat	SMP	SD
7.230	-	228	6.459	15	72	79	1	358	11	7

3. Kabupaten/Kota

Tabel 3
Data Pegawai berdasarkan Kabupaten/Kota

Jumlah Pegawai	Kabupaten/Kota										
	Ambon	Malteng	SBB	SBT	Buru	Bur sel	Tual	Mal ra	MBD	Kep. Tani mbar	Ke. Aru
7.230	1.577	1.611	836	360	484	312	261	412	438	574	299

b. Aset Tetap

Guna Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, maka Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Provinsi Maluku ditunjang dengan sarana prasarana/aset tetap yang sampai dengan 31 Desember 2024 senilai **Rp. 686.017.765.952,54,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Data Nilai Asset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Per 31 Desember 2024

NO	NAMA ASET	NILAI (Rp)
1	Tanah	Rp. 29.265.457.000,00
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 306.455.993.182,06
3	Gedung dan Bangunan	Rp. 512.500.420.534,62
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 20.856.604.114,00
5	Aset Tetap Lainnya	Rp. 14.316.503.906,70
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 343.522.150,00
Akumulasi Penyusutan		-Rp. 197.720.734.934,84
Total Nilai Aset		Rp. 686.017.765.952,54

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKIP adalah sebagai penjabaran visi dan misi yang terwujud dalam tingkat keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi instansi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pihak yang

membutuhkan, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja.

1.6 ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku serta faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya permasalahan pelayanan dimaksud, dan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta memperhatikan telaahan renstra kemendikbud 2019-2024 dan Telaahan tata ruang wilayah, maka penentuan isu strategis oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dilakukan dengan mereviu berbagai telaah yang di tinjau dari aspek aspek sebagai berikut :

1. Gambaran Pelayanan perangkat daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan daerah terjadi trend peningkatan capaian kinerja layanan dimana target capaian setiap indicator 2014-2018 berdasarkan standar IKK dan SPM justru melebihi target yang di tetapkan. Tetapi pelaksanaan pelayanan perangkat daerah tersebut justru banyak indicator yang masuk dalam progam Pendidikan Dasar sehingga setelah peralihan kewenangan dengan di keluarkan Undang Undang nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku memiliki kewenangan urusan manajemen Pendidikan menengah dan khusus sedangkan Pendidikan dasar menjadi kewenangan Kabupaten/Kota justru terjadi perubahan focus pelayanan. Dari sisi anggaran juga mengalami trend menurun dimana trend anggaran justru pada awal tahun renstra mengalami peningkatan daya serap yaitu 99.81% dan pada akhir tahun 2018 terjadi trend menurun dengan daya serap yaitu 91.01%.

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kemendikbud 2019-2024

Jika di tinjau dari Aspek Sasaran jangka menengah daerah pada Renstra Kemendikbud 2019-2024 maka revitalisasi Pendidikan vokasi yang mengarah pada pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing, perilaku positif siswa, peran pelaku budaya, peningkatan angka partisipasi

penduduk usia sekolah, mutu layanan dan lulusan justru sejalan dengan kebutuhan pengembangan Pendidikan di Maluku saat ini karena revitalisasi Pendidikan vokasi akan meningkatkan lulusan SMK yang dibutuhkan oleh Dunia Usaha dan dunia industry serta pola perilaku siswa yang cenderung negative sebagai dampak revolusi digital serta angka partisipasi penduduk usia sekolah yang menurun pada SMA/SMK dan Pendidikan Khusus jika didasarkan pada SPM Pendidikan Menengah dan khusus. Selain itu peningkatan mutu layanan dan lulusan melalui berbagai program peningkatan mutu pendidik dan kualitas peserta didik juga menjadi factor pendorong dalam pengembangan Pendidikan ke depan dengan tetap memperhatikan factor penghambat sebagaimana telah di jelaskan dalam telaahan Renstra Kemendikbud 2019-2024.

Berdasarkan aspek dimaksud dengan mempertimbangkan masalah pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku maka perlu di tentukan isu strategis sebagai upaya peningkatan kebijakan yang tepat sasaran serta memiliki daya ungkit dan berdampak ke depan terhadap masyarakat dan para pelaku Pendidikan dan Kebudayaan dengan identifikasi isu strategisnya sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus yang berkualitas dan merata
2. Rendahnya daya saing dan relevansi Pendidikan Vokasi
3. Belum optimalnya Pelayanan dan pelestarian Budaya yang berkualitas
4. Belum optimalnya sistem tata kelola Organisasi Perangkat Daerah serta manajemen pendukung tugas pembantuan urusan Pendidikan.

Berdasarkan penilaian hasil isu strategis baik pada nilai skla kriteria dan rata-rata skor maka penentuan isu Strategis yang akan berpengaruh ke depan terhadap pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagai berikut :

1. Rendahnya daya saing dan relevansi Pendidikan Vokasi
2. Belum optimalnya Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus yang berkualitas dan merata
3. Belum Optimalnya Pelayanan dan pelestarian Budaya yang berkualitas
4. Belum optimalnya sistem tata kelola Organisasi Perangkat Daerah berbasis

kinerja dalam penyelenggaraan pendidikan dan Kebudayaan.

Perencanaan Kinerja

Bab II

2.1. RENCANA STRATEGIS

a. Visi

Pembangunan pendidikan dan Kebudayaan ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subjek, yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu (a) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (b) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (c) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis. Fokus pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan ke depan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan daya saing SDM Indonesia pada era perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) dan pembangunan ekonomi kreatif.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Pada tahun 2024 difokuskan pada aspek Perluasan Akses Pendidikan, Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan, dan Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Pendidikan dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang ada atau yang mungkin timbul.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tersebut sebagaimana tertuang dalam Pedoman Penyusunan Rencana strategis pada bidang pendidikan dan Kebudayaan. LKIP merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,

peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Suatu rencana strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis (kebijakan dan program) serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya, yang mengedepankan isu-isu lokal dan merupakan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, maka rumusan mengenai Visi di dasarkan pada visi Pemerintah Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024 sebagai berikut :

Visi
<i>“Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”</i>

b. Misi

Untuk mencapai Visi Pemerintah Provinsi Maluku tersebut maka ditetapkan misi Pemerintah Provinsi Maluku yang terkait dengan bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

Kode	Misi
M2	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau
M5	Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata
M3	Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi

c. Tujuan

Bertolak dari visi dan misi di atas, maka tujuan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5
Tujuan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024

Kode	Tujuan Strategis
T1	Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia dan daya saing Pendidikan Vokasi
T2	Terwujudnya akses layanan Pendidikan Menengah dan khusus secara merata dan berkualitas
T3	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang berkualitas dan merata
T4	Terwujudnya karakter peserta didik yang memiliki kepribadian unggul serta bertanggungjawab, kreatif, dan inovatif.
T5	Peningkatan identitas budaya Maluku melalui Pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
T6	Terwujudnya kualitas tata kelola organisasi Penyelenggara Pendidikan dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan Pendidikan

Kode	Sasaran Strategis
S1	Meningkatnya sumberdaya manusia dan daya saing Pendidikan Vokasi
S2	Meningkatnya Akses layanan Pendidikan Menengah dan khusus secara murah dan merata
S3	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang berkualitas dan merata
S5	Meningkatnya identitas budaya Maluku melalui Pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
S6	Meningkatnya tata kelola organisasi Penyelenggara Pendidikan dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan Pendidikan

d. Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Renstra

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah alat ukur yang digunakan dalam rangka memperoleh gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan, sehingga terlihat indikasi tingkat keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan kegiatan yang di tetapkan, atau melaluinya dapat diperoleh

Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik sehingga dapat dibandingkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang nantinya dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sasaran Strategis (SS1) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Tujuan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
Tahun 2024

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
1	Terwujudnya kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Pendidikan Vokasi	Meningkatnya Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Pendidikan Vokasi	Persentase SMK yang aktif pada pembelajaran teaching factory	$= \frac{\text{Jumlah SMK Aktif Teaching Factory}}{\text{Total SMK}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan SMK	Data DAPODIK dan TAKOLA SMK
			Persentase jumlah lulusan SMK yang di terima Dunia Usaha dan Dunia Industri	$= \frac{\text{Jumlah Siswa SMK yg diterima DUDI}}{\text{Total Keseluruhan lulusan SMK}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan SMK	Data DAPODIK dan Data Laporan Prakerin
			Persentase SMK yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	$= \frac{\text{Jumlah SMK yang memiliki LSP}}{\text{Total SMK}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan SMK	Data BNSP
2	Terwujudnya akses layanan Pendidikan Menengah dan Khusus secara berkualitas dan merata	Meningkatnya akses layanan Pendidikan Menengah dan Khusus secara berkualitas dan merata	APK SMA/SMK/SMLB/Se derajat	$\text{APK SMA/SMK/SMLB/Sederajat} = \frac{\text{Jumlah Siswa Keseluruhan}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Thn}} \times 100\%$	Bidang SMA/SMK/PM PK	Data DAPODIK dan Data BPS
			APM SMA/SMK/MA/SMLB /Sederajat	$\text{APM SMA/SMK/SMLB/Sederajat} = \frac{\text{Jumlah Siswa Usia 16 - 18 Thn}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Thn}} \times 100\%$	Bidang SMA/SMK/PM PK	Data DAPODIK dan Data BPS

			Persentase Jumlah Penduduka Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Atas	$= \frac{\text{Jumlah Siswa SMA U 16 - 18 Thn}}{\text{Jumlah Penduduk U 16 - 18 Thn}} \times 100\%$	Bidang SMA	Data DAPODIK, Data BPS dan Capil Provinsi Maluku
			Persentase Jumlah Penduduka Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Kejuruan	$= \frac{\text{Jumlah Siswa SMK U 16 - 18 Thn}}{\text{Jumlah Penduduk U 16 - 18 Thn}} \times 100\%$	Bidang SMK	Data DAPODIK, Data BPS dan Capil Provinsi Maluku
			Persentase Jumlah Penduduk Usia 4-18 tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Khusus	$= \frac{\text{Jumlah Siswa SLB U 4 - 18 Thn}}{\text{Jumlah Penduduk U 4 - 18 Thn}} \times 100\%$	Bidang PMPK	Data DAPODIK, Data BPS dan Capil Provinsi Maluku
			Jumlah Siswa SMA/SMK/SLB Penerima Bantuan Beasiswa Miskin	Jumlah siswa miskin SMA/SMK/SLB yang menerima bantuan siswa miskin	Bidang SMA/SMK/PM PK	DPA TA 2024
			Persentase menurunnya Angka Putus Sekolah SMA/SMK	Jumlah siswa SMA/SMK yang putus sekolah dibagi dengan total siswa SMA/SMK dikalikan 100%	Bidang SMA dan SMK	DAPODIK dan Data SPM
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia > 15 Tahun	Lama Penduduk usia > 15 tahun yang menamatkan sekolah dibagi dengan jumlah penduduk usia > 15 tahun	Bidang SMA dan SMK	Data BPS
			Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Atas	a. Nilai Indeks peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi);	Bidang Pembinaan SMA	Rapor Pendidikan

			a. Literasi b. Numerasi	b. Nilai Indeks peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.		
			Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Kejuruan a. Literasi b. Numerasi	a. Nilai Indeks peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi); b. Nilai Indeks peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	Bidang Pembinaan SMK	Rapor Pendidikan
			Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Pendidikan Khusus a. Literasi b. Numerasi	a. Nilai Indeks peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi); b. Nilai Indeks peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	Bidang Pembinaan PMPK	Rapor Pendidikan

			Proporsi Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang memiliki Indeks Karakter	Rata-rata nilai karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global dan kemandirian pada survei karakter	Bidang Pembinaan SMA, SMK dan PMPK	Rapor Pendidikan
3	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang merata	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang merata	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional pada Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang Bersertifikasi Pendidik dibagi Total Guru dan Tenaga Kependidikan dikali 100%	Bidang GTK	Data DAPODIK
			Rasio ketersediaan guru terhadap siswa Pendidikan Menengah	Jumlah Guru SMA/SMK dibagi jumlah keseluruhan siswa SMA/SMK	Bidang GTK	Data DAPODIK
4	Peningkatan identitas Budaya Maluku melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan	Meningkatnya identitas Budaya Maluku melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya Tak Benda dan Benda yang dilestarikan	Jumlah Cagar Budaya Tak Benda dan Benda yang ditetapkan dan dilestarikan pada Tahun 2024	Bidang Kebudayaan	Buku Ikhtisar Data Kebudayaan
			Jumlah Event penyelenggaraan Festival Seni Daerah	Jumlah event seni daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2024	Bidang Kebudayaan	Buku Ikhtisar Data Kebudayaan
			Jumlah Pelaku Budaya yang berperan aktif	Jumlah pelaku budaya yang aktif pada Tahun 2024	Bidang Kebudayaan	Buku Ikhtisar Data Kebudayaan
5	Terwujudnya kualitas tata kelola organisasi penyelenggara Pendidikan dan Manajemen pendukung tugas	Meningkatnya tata kelola organisasi penyelenggara Pendidikan dan Manajemen pendukung tugas	Jumlah Kegiatan penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kegiatan penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan pada TA 2024	Subag. Kepegawaian dan Umum, Subag. Keuangan dan Aset dan Kelompok	DPA TA 2024

	pembantuan urusan pendidikan	pembantuan urusan pendidikan			Fungsional Perencanaan dan Tugas Pembantuan	
			Jumlah Standar Layanan Informasi Publik yang tersedia dan bisa diakses secara elektronik maupun non elektronik	Jumlah Layanan publik secara elektronik maupun non elektronik	Sekretariat Dinas	Laporan Kinerja Kegiatan
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Minimal B	Hasil Penilaian SAKIP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku	Laporan Kinerja Kegiatan

Tabel 7
Sasaran Strategis (SS1) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Tujuan Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
				2022	2023	2024
1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Pendidikan Vokasi	Jumlah SMK yang aktif pada pembelajaran teaching factory	Sekolah	52	60	65
		Persentase Jumlah lulusan SMK yang di terima Dunia Usaha dan Dunia Industri	%	30	32	34
		Persentase SMK yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	%	9,61	10	11
2	Meningkatnya akses layanan Pendidikan menengah dan khusus secara berkualitas dan merata	APK SMA/SMK/SMLB/Sederajat	%	80	82	84
		APM SMA/SMK/SMLB/Sederajat	%	68	70	73
		Persentase Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Atas	%	45	50	55
		Persentase Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Kejuruan	%	45	50	55
		Persentase Jumlah Penduduk disabilitas usia 4 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Khusus	%	15	17	20
		Jumlah siswa SMA/SMK/SLB penerima bantuan beasiswa miskin	Siswa	671	702	812
		Persentase menurunnya angka Putus Sekolah SMA/SMK/SLB	%	0.02	0.03	0.04
		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia > 15 Tahun	%	11,35	12	12,10
		Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Atas				
		a. Literasi	Indeks	1,79	1,94	2,24
		b. Numerasi	Indeks	1,72	1,87	2,17

		Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Kejuruan				
		a. Literasi	Indeks	1,75	1,90	2,20
		b. Numerasi	Indeks	1,69	1,84	2,14
		Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Pendidikan khusus				
		a. Literasi	Indeks	1,95	2,05	2,25
		b. Numerasi	Indeks	1,83	1,93	2,13
		Proporsi Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang memiliki Indeks Karakter	Indeks	2,0	2,20	2,50
3	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang merata	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional pada Jenjang Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus	%	63	65	67
		Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Siswa Pendidikan Menengah	Rasio	1:20	1:20	1:20
4	Meningkatnya identitas budaya Maluku melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya Tak benda dan Benda yang di lestarikan	Cagar Budaya	13	14	15
		Jumlah Event Penyelenggaraan Festival Seni Daerah	Event	8	9	10
		Jumlah Pelaku Budaya yang berperan Aktif	Orang	35	36	38
5	Meningkatnya tata kelola organisasi penyelenggara Pendidikan dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan pendidikan	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	Kegiatan	14	14	14
		Jumlah layanan informasi publik yang tersedia dan bisa di akses secara elektronik maupun non elektronik	Layanan	8	8	8

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang menghasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang menghasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

Sebagai langkah penjabaran Renstra ke dalam target - target tahunan dan sebagai wahana yang menghubungkan dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam tahun tertentu maka Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Provinsi Maluku telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan wujud nyata untuk meningkatkan komitmen terhadap integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 8
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku Tahun 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Pendidikan Vokasi	Persentase SMK yang aktif pada pembelajaran teaching factory	65 Sekolah
		Persentase jumlah lulusan SMK yang diterima dunia usaha dan dunia industri	34%
		Persentase SMK yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	11%
2	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus secara Berkualitas dan Merata	APK SMA/SMK/SMLB/Sederajat	84%
		APM SMA/SMK/SMLB/Sederajat	73%
		Persentase jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Atas	60%
		Persentase jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Kejuruan	55%
		Persentase jumlah penduduk disabilitas usia 4 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Khusus	60%

		Jumlah Siswa SMA/SMK/SLB Penerima Bantuan Beasiswa Miskin	1.250 Siswa
		Persentase menurunnya angka putus sekolah SMA/SMK	0,04%
		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia > 15 Tahun	12,10 Tahun
		Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Atas	
		a. Literasi	Skor 60,73
		b. Numerasi	Skor 51,14
		Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Kejuruan	
		a. Literasi	Skor 57,79
		b. Numerasi	Skor 49,83
		Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Pendidikan khusus	
		a. Literasi	Skor 54,23

		b. Numerasi	Skor 60,95
		Proporsi Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang memiliki Indeks Karakter	Skor 65
3	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang merata	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional pada Jenjang Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus	50%
		Rasio Ketersedian Guru Terhadap Siswa Pendidikan Menengah	1:13
4	Meningkatnya Identitas Budaya Maluku melalui Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Jumlah cagar budaya tak benda dan benda yang dilestarikan	15 Cagar Budaya
		Jumlah event penyelenggaraan festival seni daerah	14 Event
		Jumlah pelaku budaya yang berperan aktif	15 Orang
5	Meningkatnya tata kelola organisasi penyelenggara Pendidikan dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan pendidikan	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	4 Kegiatan
		Jumlah layanan informasi publik yang tersedia dan bisa di akses secara elektronik maupun non elektronik	8 Layanan
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B

Akuntabilitas Kinerja

Bab III

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku melakukan atribusi penilaian dengan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir skala nilai peringkat kinerja yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Dimana penilaian dilakukan sesuai kriteria gradasi nilai, sebagai berikut :

Tabel 9
Gradasi Nilai Peringkat Kinerja

No	Bobot Nilai	Kategori Capaian
1	100	AA
2	90	A
3	80	BB
4	70	B
5	60	CC
6	50	C
7	30	D
8	0	E

Penggunaan skala nilai peringkat kerja ini untuk menilai tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan sasaran kinerja serta faktor-faktor penghambat sehingga dapat memacu peningkatan dan perbaikan kinerja organisasi ke depan.

Untuk mengukur pencapaian sasaran kinerja tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menggunakan 6 (Enam) Sasaran Kinerja, maka Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dapat di uraikan secara detail sebagai berikut :

SASARAN 1

Meningkatnya Sumberdaya manusia dan daya saing Pendidikan Vokasi

Tabel 10
Capaian Sasaran Meningkatnya Sumberdaya manusia dan daya saing Pendidikan vokasi

Sasaran	1	Meningkatnya Sumberdaya Manusia dan daya saing Pendidikan Vokasi		
		dengan indikator kinerja, target kinerja, sebagai berikut:		
Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah SMK yang aktif pada pembelajaran teaching factory	65 Sekolah	57 Sekolah	87.6 9
2	Persentase Jumlah lulusan SMK yang di terima Dunia Usaha dan Dunia Industri	34%	31.23	91.85
3	Persentase SMK yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	11%	2.48	22.54
	Rata-rata capaian	67.36%		

Pada sasaran strategis 1 (Satu) yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik menjadi tenaga kerja dan mandiri dalam bidang tertentu berdasarkan tiga ranah sentral vokasi yaitu (1) realitas kompetensi yang di ajarkan di sekolah sama dengan dunia usaha dan dunia industri, (2) Kebenaran pendidikan vokasi yang ada di sekolah sama dengan dunia usaha dan dunia industri, dan (3) Nilai pendidikan vokasi yang ada di sekolah sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Rata-rata capaian ketiga indicator adalah **67.36%** dengan Kategori Penilaian **CC**. Untuk menggambarkan ukuran sasaran ini maka perlu di jabarkan melalui tabel perbandingan dengan pendekatan analisisnya sebagai berikut:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1
antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja		2023		2024	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Jumlah SMK yang aktif pada pembelajaran teaching factory	52 Sekolah	86,67%	57 Sekolah	87.69%
2	Persentase Jumlah lulusan SMK yang di terima Dunia Usaha dan Dunia Industri	31,23%	97,61%	31.23%	91.85
3	Persentase SMK yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	9,09%	90,91%	2.48%	22.54%

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1
Tahun 2023 dan 2024 serta Tahun Akhir periode RPJMD

Indikator Kinerja		Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2024
1	Jumlah SMK yang aktif pada pembelajaran teaching factory	52 Sekolah	57 Sekolah	65 Sekolah
2	Persentase Jumlah lulusan SMK yang di terima Dunia Usaha dan Dunia Industri	31,23	31.23	34%
3	Persentase SMK yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	9,09	2.48%	11%

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dalam perspektif analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah di lakukan, maka untuk tahun 2024 rata-rata capaian terhadap kinerja partisipasi penduduk usia sekolah untuk jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan dengan 3 indikator kinerja secara rata rata sangat memuaskan dan mampu mencapai target yang di tetapkan. Analisis keberhasilan untuk setiap indicator kinerja adalah sebagai berikut:

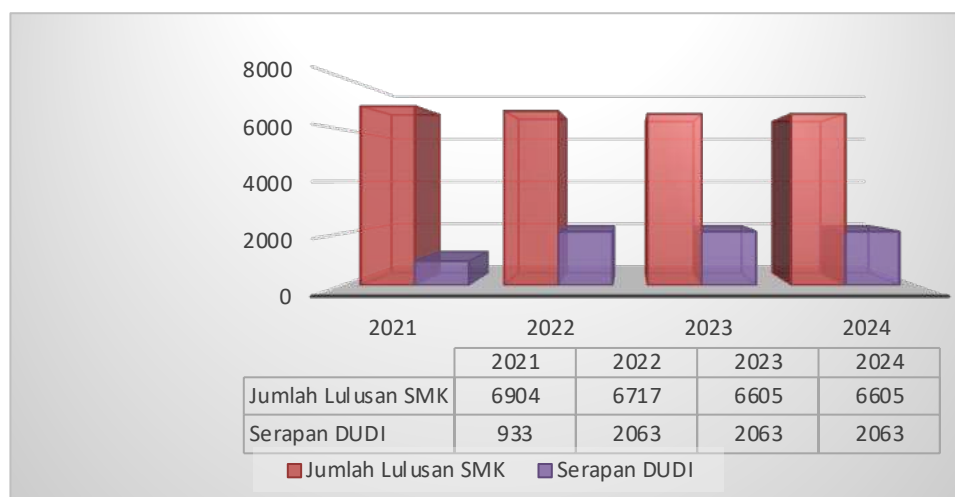
- 1) Untuk indikator Jumlah SMK yang aktif pada pembelajaran teaching factory tahun 2024, realisasinya sebesar 57 Sekolah dari target yang telah ditetapkan yaitu 65 Sekolah, dengan rata-rata capaiannya 87.69%. Jika dibandingkan tahun 2023 yang dengan realisasi sebesar 52 sekolah, maka pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 5 sekolah. Teaching Factory atau disebut dalam PP 41 tahun 2015 “pabrik dalam sekolah (teaching factory)” adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata Industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan”. Dalam Grand Design TeFa SMK di definisikan sebagai “suatu konsep pembelajaran di SMK berbasis produksi/jasa yang mengacu kepada standar dan prosedur yang berlaku di industri dan dilaksanakan dalam suasana seperti yang terjadi di industri” dan dalam pelaksanaannya menuntut keterlibatan mutlak pihak industri sebagai pihak yang relevan menilai kualitas hasil pendidikan dari SMK serta melibatkan Pemda. Pelaksanaan Teaching factory atau Pabrik Dalam Sekolah di SMK akan meliputi 7 komponen terdiri dari : Pengkondisian SMK, pembenahan Ruang Praktik/Bengkel/Laboratorium, Penentuan Produk-Jasa TeFa, Model pembelajaran – training, SDM, Manajemen, Hubungan Industri dan Informasi produk barang atau layanan jasa. SMK perlu memiliki guru produktif/instruktur yang memadai dari segi jumlah, jenis, kualifikasi dan pengalaman bekerja/magang di industri yang sesuai dengan lingkup produk pada model pembelajaran Teaching Factory, karena guru/instruktur memiliki peran utama dan strategis dalam pelaksanaan produksi (barang dan atau jasa) yang berkualitas sesuai dengan standar yang berlaku di industri/jasa, sehingga dalam prosesnya belum ada peningkatan jumlah sekolah yang menyelenggarakan Model pembelajaran TeFa dikarenakan komponen serta syarat yang dinilai masih susah untuk dipenuhi oleh sekolah. Sampai saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus mendorong SMK untuk dapat meningkatkan Pendidikan di SMK salah satunya lewat penerapan Model Pembelajaran TeFa dengan menyediakan Dana baik DAK dan DAU dengan menyediakan kegiatan Pembangunan ruang praktik dan laboratorium sekolah serta Dana BOS dan BOPPD yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran TeFa. Sebaran Persentase Siswa SMK yang aktif dalam pembelajaran teaching factory tahun 2024 pada setiap kabupaten/kota di Maluku dapat di lihat pada tabel 13 berikut ini:

Tabel 13
Data SMK yang aktif
dalam Pembelajaran Teaching Factory
Provinsi Maluku Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jumlah Sekolah	Jumlah Sekolah yang Aktif Pembelajaran Teaching Factory 2023	Nama Sekolah yang Aktif Pembelajaran Teaching Factory	Keterangan
1	Kab. Buru	9	5	SMK NEGERI 1 BURU	
				SMK NEGERI 4 BURU	
				SMK NEGERI 7 BURU	
				SMK NEGERI 2 BURU	
				SMK ALHILAL NAMLEA	
2	Kab. Buru Selatan	10	4	SMK NEGERI 1 BURU SELATAN	
				SMK NEGERI 3 BURU SELATAN	
				SMK NEGERI 5 BURU SELATAN	
				SMK NEGERI 7 BURU SELATAN	
3	Kab. Kepulauan Aru	6	2	SMK NEGERI 1 KEPULAUAN ARU	
				SMK PGRI DOBO	
4	Kab. Kepulauan Tanimbar	8	7	SMK NEGERI 5 KEPULAUAN TANIMBAR	
				SMK NEGERI 6 KEPULAUAN TANIMBAR	
				SMK NEGERI 7 KEPULAUAN TANIMBAR	
				SMK NEGERI 3 KEPULAUAN TANIMBAR	
				SMK NEGERI 4 KEPULAUAN TANIMBAR	
				SMK NEGERI 2 KEPULAUAN TANIMBAR	
				SMK IMAKULATA SAUMLAKI	
5	Kab. Maluku Barat Daya	12	2	SMK NEGERI 2 MALUKU BARAT DAYA	
				SMK NEGERI 8 MALUKU BARAT DAYA	
6	Kab. Maluku Tengah	14	6	SMK NEGERI 11 MALUKU TENGAH	
				SMK NEGERI 2 MALUKU TENGAH	
				SMK NEGERI 5 MALUKU TENGAH	
				SMK NEGERI 6 MALUKU TENGAH	
				SMK NEGERI 1 MALUKU TENGAH	
				SMK NEGERI 4 MALUKU TENGAH	
7	Kab. Maluku Tenggara	11	7	SMK MUHAMMADIYAH WAIN	
				SMK NEGERI 3 MALUKU TENGGARA	
				SMK SIWA LIMA St. JOSEP LANGGUR	
				SMK KESEHATAN LANGGUR	
				SMK NEGERI 2 MALUKU TENGGAEA	
				SMK PARIWISATA SANTHA THERESIA LANGGUR	
				SMK NEGERI 1 MALUKU TENGGARA	
8	Kab. Seram Bagian Barat	17	6	SMK NEGERI 11 SERAM BAGIAN BARAT	
				SMK NEGERI 2 SERAM BAGIAN BARAT	
				SMK NEGERI 4 SERAM BAGIAN BARAT	
				SMK NEGERI 9 SERAM BAGIAN BARAT	
				SMK NEGERI 12 SERAM BAGIAN BARAT	
				SMK NEGERI 10 SERAM BAGIAN BARAT	
9	Kab. Seram Bagian Timur	8	2	SMK NEGERI 1 SERAM BAGIAN TIMUR	
				SMK NEGERI 3 SERAM BAGIAN TIMUR	
10	Kota Ambon	20	13	SMK AL-WATHAN AMBON	
				SMK KESEHATAN AMBON	
				SMK MUHAMMADIYAH AMBON	
				SMK NEGERI 1 AMBON	
				SMK NEGERI 2 AMBON	
				SMK NEGERI 3 AMBON	
				SMK NEGERI 4 AMBON	
				SMK NEGERI 5 AMBON	
				SMK NEGERI 6 AMBON	
				SMK NEGERI 7 AMBON	
				SMK NEGERI 8 AMBON	
				SPP PROVINSI MALUKU	
11	Kota Tual	6	3	SMK NEGERI 1 TUAL	
				SMK NEGERI 2 TUAL	
				SMK PERIKANAN LUSWED TUAL	
Total		121	57		

- 2) Indikator Persentase Jumlah lulusan SMK yang di terima Dunia Usaha dan Dunia Industri tahun 2024, realisasinya adalah 31.23% dari target 34% dengan rata-rata capaian adalah 91.85%. Hal ini didapatkan dari Jumlah siswa SMK yang diterima DUDI dibagi total lulusan SMK tahun 2024 dikali 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 31.23%, maka jumlah lulusan SMK yang diterima Dunis Usaha dan Dunia Industri pada tahun 2024 sama. Hal ini dikarenakan data terbaru (2024) masih menunggu hasil rapor Pendidikan 2025 pada bulan April s.d Juni 2025. Data lulusan SMK yang di terima DUDI merupakan Lulusan SMK pada tahun 2024 kemudian akan di Tracer Study melalui Laman <http://tracervokasi.kemdikbud.go.id> yang terintegrasi dengan DAPODIK. Instrumen Tracer Study diisi oleh lulusan secara daring, kemudian akan dilakukan Analisa data hasil Tracer Study kemudian laporan hasil Tracer Study yang disajikan untuk Tingkat Satuan Pendidikan SMK (Provinsi dan Nasional). Pengelola data dalam Platform Sistem Informasi Tracer Study adalah Dirjen Pendidikan Vokasi, BBPPMPV/BPPMPV, Dinas Pendidikan Provinsi dan SMK. Tujuan dilakukannya Tracer Study oleh Direktorat Kemitraan dan Penyeragaman DUDI adalah untuk mengetahui dampak berbagai program Pendidikan Vokasi terhadap Lulusan : Bekerja, melanjutkan studi, wirausaha. Hal ini jmerupakan salah satu Upaya yang dilakukan baik Pusat maupun Daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk meningkatkan kualitas lulusan sehingga mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang mandiri serta efektifnya kurikulum *link and match* pada jenjang Sekolah menengah Kejuruan di Provinsi Maluku. Sebaran persentase jumlah lulusan SMK yang diterima di Dunia Usaha dan Dunia Industri dapat dilihat pada tabel 14 dibawah ini :

Gambar 1
Lulusan SMK yang diterima di Dunia Usaha dan Dunia Industri
Provinsi Maluku Tahun 2024



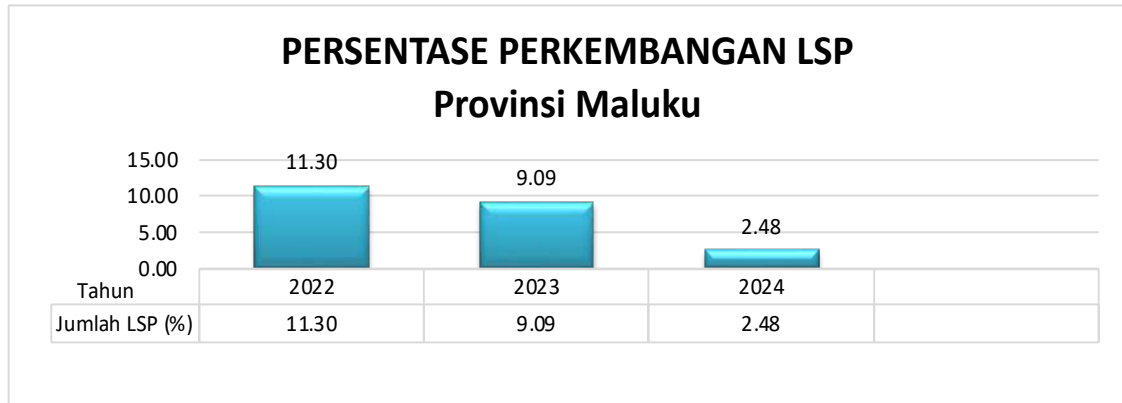
- 3) Untuk indikator Persentase SMK yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 2024, realisasinya sebesar 2.48% dari target 11% dengan capaiannya adalah 22.54%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 9.09%, maka terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 6.61%. Penurunan ini terjadi karena syarat Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dimana setiap SMK di Maluku harus memiliki usaha atau kewirusahaan mandiri dengan badan hukum usaha serta memiliki surat dukungan asosiasi industry terkait atau dukungan asosiasi profesi serta memiliki Tempat Uji Kompetensi (TUK). Hal ini kemudian mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk terus menggerakkan kompetensi keahlian SMK mendapatkan pengakuan melalui Lisensi diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP . penjabaran SMK pada setiap Kab/Kota di Maluku yang memiliki LSP dapat di lihat pada tabel 14 berikut ini:

Tabel 14
Persentase SMK yang memiliki LSP
Provinsi Maluku Tahun 2024

NO	NPSN	NAMA PENGELOLA LSP	STATUS	ALAMAT	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	TYPE LSP	KET
1	60102001	SMKN 1 AMBON	Negeri	JL. PITU INA KARANG PANJANG RT 1 RW 1 Kel Amantelu Kode Pos 97127	Prov. Maluku	Kota Ambon	Kec. Sirimau	LSP P1	
2	60101998	SMKN 2 AMBON	Negeri	JL. DR. LEIMENA HATIVE BESAR RT 1 RW 5 Hative Besar Kode Pos 97234	Prov. Maluku	Kota Ambon	Kec. Teluk Ambon	LSP P1	
3	60101987	SMKN 3 AMBON	Negeri	JL. LAKSDYA WATTIMENA - WAIHERU RT 3 RW 5 WAIHERU Kode Pos 97233	Prov. Maluku	Kota Ambon	Kec. Baguala	LSP P1	

Persentase SMK yang memiliki LSP pada tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini :

Gambar 2
Perkembangan LSP Provinsi Maluku
Tahun 2022-2024



b. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam konteks analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) maka sasaran strategis meningkatnya sumberdaya manusia dan daya saing Pendidikan di Vokasi di kelola oleh 2 (dua) bidang teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yaitu Bidang Pembinaan SMK dengan jumlah aparatur adalah 11 orang. Untuk 13 ASN yang berada pada Bidang Pembinaan SMK sudah sangat efisien dengan pembagian tugas yang dibagikan sesuai jabatan serta tupoksi masing-masing. Aparatur yang ada tetap fokus pada pengelolaan program dan kegiatan yang efektif dan tepat sasaran guna memenuhi capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

c. Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran

Untuk menunjang keberhasilan dari sasaran strategis ini maka terdapat program yang menunjang kinerja pencapaian setiap indikator sasaran ini ditunjang oleh 1 program, 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang ditetapkan pada Tabel 15 sebagai berikut :

Tabel 15
Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran Meningkatnya
Sumberdaya manusia dan daya saing Pendidikan Vokasi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendidikan		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	18.055.485.000	16,340,591,671
	Pembangunan Ruang Laboratorium	35.901.763.000	32,190,237,298
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	537.742.000	357.818.520

Pada tabel diatas, program yang menunjang sasaran ini adalah 1 program, 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Upaya kedepan yang akan dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku adalah dengan meningkatkan Pembangunan sarpras serta peningkatan kualitas peserta didik SMK dengan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas yakni dengan penyelenggaraan lomba-lomba seperti O2SN, FLS2N, dan LKSN.

SASARAN 2

Meningkatnya akses layanan Pendidikan menengah dan khusus secara berkualitas dan merata

Tabel 16
Capaian Sasaran Meningkatnya akses layanan Pendidikan menengah dan khusus secara berkualitas dan merata

Sasaran		2		
		Meningkatnya akses layanan Pendidikan menengah dan khusus secara berkualitas dan merata		
		dengan indikator kinerja, target kinerja, sebagai berikut:		
Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	APK SMA/SMK/SMLB/Sederajat	84%	71.08%	84.62
2	APM SMA/SMK/SMLB/Sederajat	73%	55.53%	76.07
3	Persentase jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Atas	60%	54.17%	90.28
4	Persentase jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Kejuruan	55%	16.24%	29.53
5	Persentase jumlah penduduk disabilitas usia 4 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Khusus	60%	67%	111.33
6	Jumlah Siswa SMA/SMK/SLB Penerima Bantuan Beasiswa Miskin	1.250 Siswa	1.249 Siswa	99.92
7	Persentase menurunnya angka putus sekolah SMA/SMK	0,04%	0.9%	4.60
8	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia > 15 Tahun	12,10 Tahun	10,44 Tahun	86,28

9	Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Atas			
	a. Literasi	Skor 60.73	46.6	76.73
	b. Numerasi	Skor 51.14	49.17	96.15
10	Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Kejuruan			
	a. Literasi	Skor 57.79	40.06	63.32
	b. Numerasi	Skor 49.83	44	88.30
11	Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Pendidikan khusus			
	a. Literasi	Skor 54.23	69,44	128.05
	b. Numerasi	Skor 60.95	58.33	95.70
12	Proporsi Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang memiliki Indeks Karakter	Skor 65	53.87	82.87
Rata-rata Capaian		80.92%		

Pada sasaran strategis 2 (dua) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penduduk usia sekolah, pengentasan kemiskinan serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang Pendidikan menengah melalui upaya perluasan akses Pendidikan menengah, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku terus berupaya untuk meningkatkan angka partisipasi penduduk usia sekolah melalui peningkatan APK/APM, Angka Partisipasi Sekolah, Rata rata lama sekolah serta menekan angka disparitas APK antara penduduk termiskin dan penduduk terkaya. Pada sasaran 2 ini terdapat 12 indikator dimana rata-rata capaian realisasi terhadap target pada tahun 2024 sebesar 80.92% dengan kategori penilaian **BB**. Untuk menggambarkan ukuran sasaran ini maka perlu di jabarkan dengan tabel perbandingan dan pendekatan analisisnya sebagai berikut :

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2
antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja		2023		2024	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	APK SMA/SMK/SMLB/Se derajat	74.75%	91.15%	71.08%	84.62%
2	APM SMA/SMK/SMLB/Se derajat	62.41%	89.16%	55.53%	76.07%
3	Persentase jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Atas	56.86%	113.71%	54.17%	90.28%
4	Persentase jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Kejuruan	17.74%	35.48%	16.24%	29.53%
5	Persentase jumlah penduduk disabilitas usia 4 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Khusus	51.52%	303%	67%	111.33%
6	Jumlah Siswa SMA/SMK/SLB Penerima Bantuan Beasiswa Miskin	1.271 Siswa	178%	1.249 Siswa	99.92%
7	Persentase menurunnya angka putus sekolah SMA/SMK	1.97%	1.52%	0.87%	4.60%
8	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia > 15 Tahun	10.38 Tahun	86.50%	10.44	86.28%
9	Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi				

	Minimum Sekolah Menengah Atas				
	a. Literasi	Indeks 0.48	2.24%	Skor 46.6	76.73%
	b. Numerasi	Indeks 0.70	2.17%	Skor 49.17	96.15%
10	Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Kejuruan				
	a. Literasi	Indeks 0.36	2.20%	Skor 40.06	63.32%
	b. Numerasi	Indeks 0.33	2.14%	Skor 44	88.30%
11	Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Pendidikan khusus				
	a. Literasi	Indeks 0.82	2.25%	Skor 69.44	128.05%
	b. Numerasi	Indeks 1.00	2.13%	Skor 58.33	95.70%
	Proporsi Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang memiliki Indeks Karakter	Indeks 0.40	2.50%	Skor 53.87	82.87%

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2
Tahun 2023 dan 2024 serta Tahun Akhir periode RENSTRA

Indikator Kinerja		Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2024
1	APK SMA/SMK/SMLB/Sederajat	74,75%	71.08%	84%
2	APM SMA/SMK/SMLB/Sederajat	62,41%	55.53%	73%

3	Persentase jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Atas	56,86%	54.17%	60%
4	Persentase jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Kejuruan	17,74%	16.24%	55%
5	Persentase jumlah penduduk disabilitas usia 4 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Khusus	51,52%	67%	111.33%
6	Jumlah Siswa SMA/SMK/SLB Penerima Bantuan Beasiswa Miskin	1.271 Siswa	1.249 Siswa	1.250 siswa
7	Persentase menurunnya angka putus sekolah SMA/SMK	1.97%	0.87	0,04%
8	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia > 15 Tahun	10,38 Tahun	10.44	12,10 Tahun
9	Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Atas			
	a. Literasi	0,48	Skor 46.6	Skor 60.73
	b. Numerasi	0,70	Skor 49.17	Skor 51.14
10	Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Kejuruan			
	a. Literasi	0,36	Skor 40.06	Skor 57.79
	b. Numerasi	0,33	Skor 44	Skor 49.83
11	Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Pendidikan khusus			
	a. Literasi	0,82	Skor 69.44	Skor 54.23
	b. Numerasi	1,00	Skor 58.33	Skor 60.95
	Proporsi Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang memiliki Indeks Karakter	0,40	Skor 53.87	Skor 65

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dalam perspektif analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, maka untuk tahun 2024 rata-rata capaian terhadap kinerja partisipasi penduduk usia sekolah untuk jenjang Pendidikan Menengah dengan 8 indikator kinerja secara rata rata cukup berhasil dan mendekati target yang ditetapkan. Analisis keberhasilan untuk setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut:

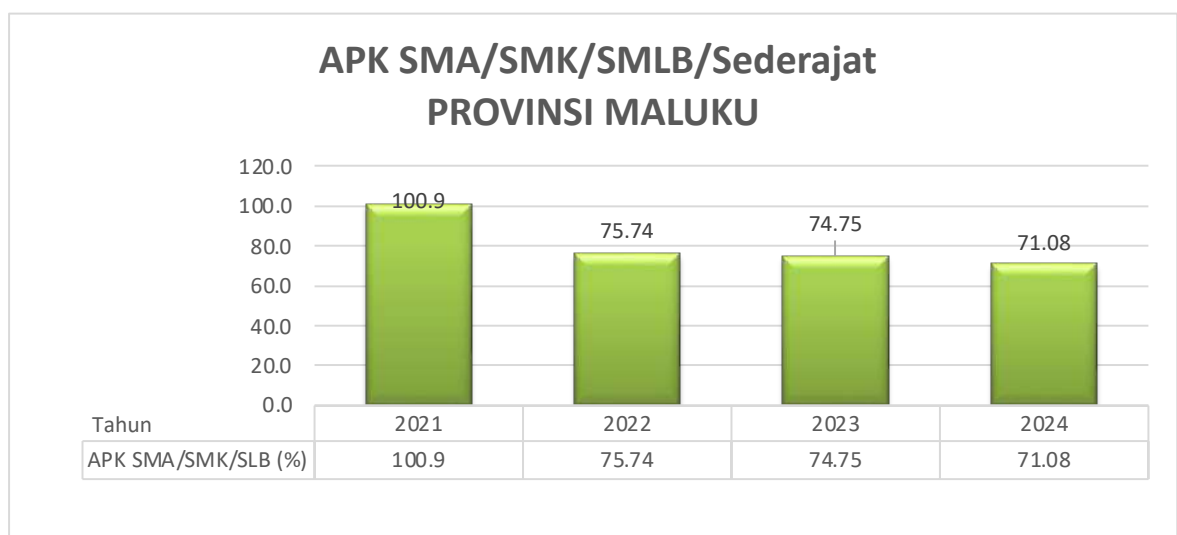
- 1) Untuk indikator APK SMA/SMK/SMLB/Sederajat untuk tahun 2024, realisasinya sebesar 71.08% dari target yang telah ditetapkan yaitu 84% dengan rata-rata capaian adalah 84.62%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan realisasi 74,75% maka pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 3.67%. Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan jumlah siswa SMA/SMK/SLB pada tahun 2024. Pada Tahun 2023 siswa keseluruhan SMA/SMK/SLB berjumlah 91.041 sementara pada tahun 2024 berjumlah 89.658 turun sebesar 1.383 siswa. Meskipun mengalami penurunan indikator ini dikatakan berhasil, namun tetap memerlukan Upaya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas terkait dalam Upaya meningkatkan angka partisipasi siswa pada jenjang SMA, SMK dan SLB serta memutus angka putus sekolah dan Anak tidak Sekolah, sehingga pemerataan Pendidikan dapat terjadi dengan baik di Maluku khususnya. Keberhasilan dari Kebijakan perluasan akses melalui upaya memperluas daya tampung sekolah serta menyediakan akses bagi peserta didik melalui berbagai event yang dapat meningkatkan potensi kreatif sehingga berdampak pada perluasan partisipasi sekolah. Sebaran APK SMA/SMK/SMLB/Sederajat tahun 2024 pada 11 Kab/Kota di Maluku dapat dilihat pada tabel 19 berikut ini :

Tabel 19
Data APK SMA/SMK/SMALB/Sederajat
Provinsi Maluku Tahun 2024

No	KABUPATEN/KOTA	PU 16-18 TAHUN	PESERTA DIDIK KESELURUHAN									TOTAL	APK
			SMA			SMK			SLB				
			P	L	JUMLAH	P	L	JUMLAH	P	L	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kabupaten Buru	9,255	2,375	2,368	4,743	942	1,042	1,984	25	39	64	6,791	73.38
2	Kabupaten Buru Selatan	5,814	1,315	1,338	2,653	586	684	1,270	21	12	33	3,956	68.04
3	Kabupaten Kep. Aru	7,490	1,612	1,587	3,199	643	780	1,423	20	21	41	4,663	62.26
4	Kepulauan Tanimbar	9,361	2,750	2,335	5,085	574	915	1,489	19	35	54	6,628	70.80
5	Kabupaten Maluku Barat Daya	5,470	1,817	1,777	3,594	503	500	1,003	-	-	-	4,597	84.04
6	Kabupaten Maluku Tengah	28,315	7,809	8,163	15,972	704	981	1,685	38	63	101	17,758	62.72
7	Kabupaten Maluku Tenggara	8,391	1,643	1,717	3,360	808	1,090	1,898	29	45	74	5,332	63.54
8	Kabupaten Seram Bagian Barat	14,848	4,224	4,360	8,584	591	708	1,299	33	41	74	9,957	67.06
9	Kabupaten Seram Bagian Timur	10,184	2,038	1,970	4,008	495	588	1,083	-	-	-	5,091	49.99
10	Kota Ambon	21,116	6,852	7,098	13,950	2,999	3,373	6,372	124	255	379	20,701	98.03
11	Kota Tual	5,890	1,691	1,486	3,177	433	550	983	8	16	24	4,184	71.04
Total		126,134	34,126	34,199	68,325	9,278	11,211	20,489	317	527	844	89,658	71.08

Berdasarkan tabel tersebut maka peningkatan APK jika di bandingkan dengan tahun tahun sebelumnya dapat di lihat pada gambar 3 berikut ini :

Gambar 3
Realisasi APK SMA/SMK/SMLB/Sederajat
Provinsi Maluku Tahun 2021-2024



- 2) Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/SMLB/Sederajat pada tahun 2024 di targetkan 73% dengan realisasi atas target yaitu 55.53% dengan capaiannya adalah 76.07%. Jika di bandingkan dengan realisasi tahun 2023

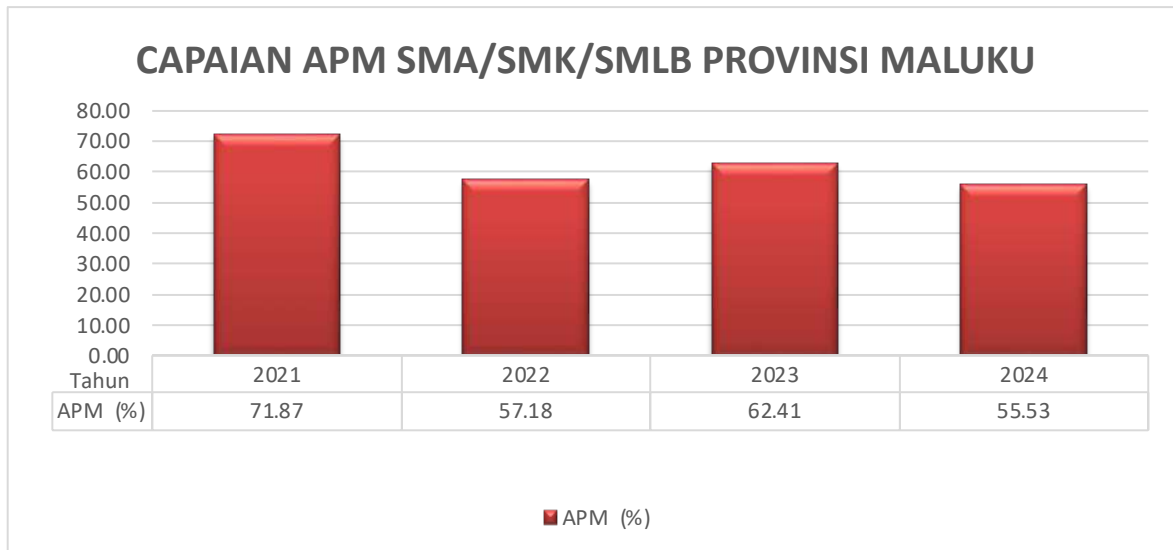
sebesar 62.41% ,maka pada tahun 2024 terjadi penurunan APM sebesar 6,88%. Penurunan ini disebabkan jumlah penduduk usia 16-18 yang berada pada jenjang Pendidikan SMA/SMK/SMALB mengalami penurunan sekitar 5.97. Total Penduduk Usia 16-18 Tahun di 11 Kab/Kota di Provinsi Maluku berjumlah 126.134 jiwa meningkat sebesar 4.333 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2023, sementara peserta Didik Usia 16-18 Tahun yang bersekolah pada jenjang SMA/SMK/SMALB di 11 Kab/Kota hanya berjumlah 70.043 siswa. Penurunan ini tidak luput dari menurunnya APS Provinsi Maluku Tahun 2024 terutama pada Jenjang SMA/SMK/SMLB/Sederajat. Dibutuhkan kebijakan serta program, kegiatan serta regulasi yang akurat, efektif dan akuntabel dan kesungguhan Pemerintah Provinsi Maluku khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk dapat meningkatkan kualitas Pendidikan di Maluku kedepannya khususnya APS, sehingga semakin meluasnya hak masyarakat untuk mendapatkan Pendidikan di Provinsi Maluku. Sebaran Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/SMLB/Sederajat di Maluku pada tahun 2024 dapat di lihat pada tabel 20 berikut ini:

Tabel 20
Realisasi APM SMA/SMK/SMLB/Sederajat
Provinsi Maluku Tahun 2024

No	KABUPATEN/KOTA	PU 16-18 TAHUN	PESERTA DIDIK U 16-18 TAHUN									TOTAL	APM
			SMA		JUMLAH	SMK		JUMLAH	SLB				
			P	L		P	L		JUMLAH	P	L		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kabupaten Buru	9,255	1,936	1,873	3,809	740	825	1,565	6	13	19	5,393	58.27
2	Kabupaten Buru Selatan	5,814	961	1,008	1,969	452	490	942	2	3	5	2,916	50.15
3	Kabupaten Kep. Aru	7,490	1,175	1,148	2,323	468	515	983	6	7	13	3,319	44.31
4	Kepulauan Tanimbar	9,361	2,195	1,832	4,027	450	696	1,146	3	8	11	5,184	55.38
5	Kabupaten Maluku Barat Daya	5,470	1,459	1,413	2,872	366	372	738	-	-	-	3,610	66.00
6	Kabupaten Maluku Tengah	28,315	5,946	6,244	12,190	608	846	1,454	69	79	148	13,792	48.71
7	Kabupaten Maluku Tenggara	8,391	1,262	1,210	2,472	824	586	1,410	18	13	31	3,913	46.63
8	Kabupaten Seram Bagian Barat	14,848	3,337	3,438	6,775	472	545	1,017	15	9	24	7,816	52.64
9	Kabupaten Seram Bagian Timur	10,184	1,617	1,543	3,160	363	430	793	-	-	-	3,953	38.82
10	Kota Ambon	21,116	5,378	5,632	11,010	2,374	2,580	4,954	29	57	86	16,050	76.01
11	Kota Tual	5,890	1,270	445	1,715	1,270	1,105	2,375	2	5	7	4,097	69.56
Total		126,134	26,536	25,786	52,322	8,387	8,990	17,377	150	194	344	70,043	55.53

Berdasarkan tabel 19 maka penurunan APM di bandingkan dengan tahun sebelumnya dapat di lihat pada Gambar 4 Sebagai berikut :

Gambar 4
APM SMA/SMK/SMLB/Sederajat
Prov.Maluku Tahun 2021-2024



- 3) Untuk indikator Persentase Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Atas belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 60% dengan realisasi atas target yaitu 54.17% , sedangkan rata rata capaian berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target adalah 90.28%. Jika dibandingkan dengan tingkat realisasi tahun 2023 sebesar 56.86%, maka tahun 2024 realisasi persentase jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang berpartisipasi pada sekolah menengah atas mengalami penurunan sebesar 2.69%. Penurunan ini terjadi karena angka partisipasi siswa usia 16-18 pada jenjang sekolah menengah atas di Provinsi Maluku tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 926 orang. Meskipun mengalami penurunan, namun jika dilihat dari perspektif target terhadap realisasi, maka indikator ini dapat dikatakan sangat berhasil. Namun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam rangka menindaklanjuti Permendikbud 32 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dilakukan melalui kebijakan perluasan akses partisipasi pendidikan bagi penduduk usia 16 – 18 tahun pada jenjang Sekolah Menengah Atas masih membutuhkan penanganan perluasan akses yang lebih optimal serta sebagai upaya peningkatan kualitas layanan Pendidikan di Maluku. Pemenuhan partisipasi Penduduk usia 16 – 18 tahun pada jenjang Sekolah Menengah Atas dapat di lihat pada tabel 21 berikut ini :

Tabel 21
Jumlah Penduduk usia 16 – 18 tahun yang
Berpartisipasi pada jenjang SMA
Provinsi Maluku Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	PU 16-18 TAHUN	PESERTA DIDIK SMA U 16-18 TAHUN			TINGKAT PARTISIPASI
			P	L	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Buru	9,255	2,375	2,368	4,743	51.25
2	Kabupaten Buru Selatan	5,814	1,315	1,338	2,653	45.63
3	Kabupaten Kep. Aru	7,490	1,612	1,587	3,199	42.71
4	Kepulauan Tanimbar	9,361	2,750	2,335	5,085	54.32
5	Kabupaten Maluku Barat Daya	5,470	1,817	1,777	3,594	65.70
6	Kabupaten Maluku Tengah	28,315	7,809	8,163	15,972	56.41
7	Kabupaten Maluku Tenggara	8,391	1,643	1,717	3,360	40.04
8	Kabupaten Seram Bagian Barat	14,848	4,224	4,360	8,584	57.81
9	Kabupaten Seram Bagian Timur	10,184	2,038	1,970	4,008	39.36
10	Kota Ambon	21,116	6,852	7,098	13,950	66.06
11	Kota Tual	5,890	1,691	1,486	3,177	53.94
Total		126,134	34,126	34,199	68,325	54.17

- 4) Indikator Persentase Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Kejuruan target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 55% dengan realisasi sebesar 16.24%, sedangkan rata rata capaian berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target adalah 29.53%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 17.74%, maka pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1.50%. Penurunan ini disebabkan karena terjadi penurunan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang SMK tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 1.117 siswa. Indikator ini dinyatakan belum berhasil. Hal ini dikarenakan partisipasi penduduk usia 16-18 tahun yang pada SMK masih sangat minim jika dibandingkan dengan partisipasi pada SMA serta tersebarnya partisipasi penduduk usia 16-18 tahun pada jenjang Pendidikan menengah lain seperti SM Keagamaan, pesantren maupun Jenjang Pendidikan Menengah lainnya serta APS dan ATS tahun 2024. Hal ini merupakan tanggungjawab Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku rangka menindaklanjuti Permendikbud 32 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dilakukan melalui kebijakan perluasan akses partisipasi pendidikan bagi penduduk usia 16 – 18 tahun pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan mengalami peningkatan dalam penanganan perluasan akses yang lebih optimal serta sebagai upaya peningkatan kualitas layanan Pendidikan di Maluku, khususnya pada jenjang Pendidikan SMK. Pemenuhan partisipasi Penduduk usia 16 – 18 tahun pada jenjang

Sekolah Menengah Kejuruan dapat di lihat pada tabel 22 berikut ini :

Tabel 22
Jumlah Penduduk usia 16 – 18 tahun yang
Berpartisipasi pada jenjang SMK
Provinsi Maluku Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	PU 16-18 TAHUN	PESERTA DIDIK SMK U 16-18 TAHUN			TINGKAT PARTISIPASI
			P	L	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Buru	9,255	942	1,042	1,984	21.44
2	Kabupaten Buru Selatan	5,814	586	684	1,270	21.84
3	Kabupaten Kep. Aru	7,490	643	780	1,423	19.00
4	Kepulauan Tanimbar	9,361	574	915	1,489	15.91
5	Kabupaten Maluku Barat Daya	5,470	503	500	1,003	18.34
6	Kabupaten Maluku Tengah	28,315	704	981	1,685	5.95
7	Kabupaten Maluku Tenggara	8,391	808	1,090	1,898	22.62
8	Kabupaten Seram Bagian Barat	14,848	591	708	1,299	8.75
9	Kabupaten Seram Bagian Timur	10,184	495	588	1,083	10.63
10	Kota Ambon	21,116	2,999	3,373	6,372	30.18
11	Kota Tual	5,890	433	550	983	16.69
Total		126,134	9,278	11,211	20,489	16.24

- 5) Indikator Persentase Jumlah Penduduk disabilitas usia 4 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Khusus pada tahun 2024 memiliki target yaitu 60% dengan realisasi sebesar 67% dengan rata rata capaian berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target sebesar 111.33%. Dalam konteks antara target dan realisasi tahun 2024, maka indikator ini dinyatakan berhasil. Meskipun dinyatakan berhasil, akan tetapi jumlah penduduk disabilitas usia 4-18 tahun masih banyak yang belum berpartisipasi pada Jenjang SLB. Dibutuhkan perhatian serta Kerjasama semua pihak/Stakeholder/pemangku kebijakan untuk meningkatkan angka partisipasi penduduk disabilitas usia 4-18 tahun untuk berpartisipasi pada Pendidikan jenjang Sekolah Luar Biasa maupun sekolah inklusif serta data akurat mengenai Penduduk disabilitas, sehingga bisa dilakukan Tracking terhadap Anank Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah Disabilitas. Rendahnya partisipasi ini juga dikarenakan banyak siswa disabilitas yang bersekolah pada jenjang sekolah umum (sekolah Inklusif) bukan SLB serta masih kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak-anak penyandang disabilitas, kurangnya guru PLB (Pendidikan Luar Biasa) serta terdapat 2 kabupaten yakni Kabupaten SBT dan Kabupaten MBD yang belum memiliki SLB. Kebijakan yang dilakukan dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam hal ini bidang PMPK untuk meningkatkan partisipasi penduduk disabilitas adalah dengan menyediakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana seperti beasiswa

(BOSP, BOPPD, KMC, BSM), penyediaan ruang belajar dan ruang pendukung kegiatan pembelajaran lainnya serta pemeliharaan ruang yang mengalami kerusakan dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi siswa serta menyediakan daya tampung yang cukup bagi penduduk disabilitas yang akan bersekolah.

Di jenjang Sekolah juga dilakukan PPDB dengan sosialisasi ke rumah-rumah warga yang memiliki anak dengan disabilitas agar mau disekolahkan serta Bidang GTK dalam hal pemerataan guru terutama guru PLB untuk SLB. Semua Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku serta Pemprov Maluku sudah dilakukan sehingga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi penduduk disabilitas untuk mau bersekolah sebagai Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam rangka menindaklanjuti Permendikbud 32 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dilakukan melalui kebijakan perluasan akses partisipasi pendidikan bagi penduduk disabilitas usia 4 – 18 tahun pada jenjang Sekolah Luar Biasa masih membutuhkan penanganan perluasan akses yang lebih optimal serta sebagai upaya peningkatan kualitas layanan Pendidikan di Maluku serta dibutuhkan Kerjasama antar OPD Teknis untuk mengatasi masalah ini. Pemenuhan partisipasi Penduduk disabilitas usia 4 – 18 tahun pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan dapat di lihat pada tabel 23 berikut ini :

Tabel 23
Berpartisipasi pada Jenjang SLB
Provinsi Maluku Tahun 2024

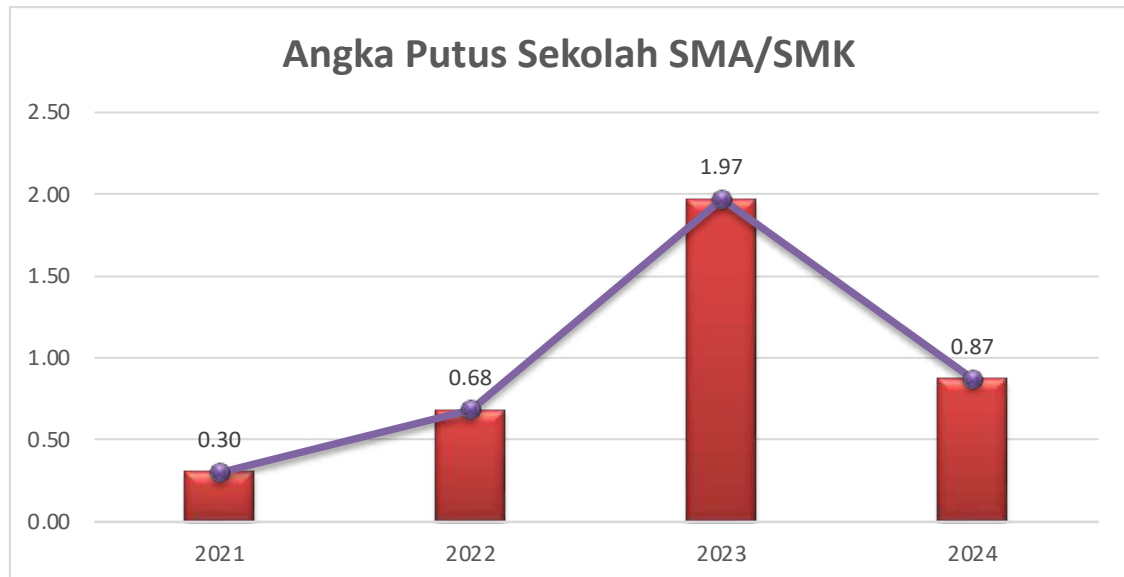
No	Kota/ Kabupaten	Penduduk Disabilitas Usia 4-18 tahun	Jumlah Siswa Usia 4-18 Tahun Penyandang disabilitas			Total Siswa Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas	Tingkat Partisipasi (%)
			SDLB	SMPLB	SMALB		
1	Buru	80	24	24	19	67	84
2	Buru Selatan	46	10	18	5	33	72
3	Kepulauan Aru	33	35	5	-	40	121
4	Kepulauan Tanimbar	142	25	16	12	53	37
5	Kota Ambon	328	160	129	89	378	115
6	Kota Tual	47	17	7	6	30	64
7	Maluku Barat Daya	106	-	-	-	0	0
8	Maluku Tengah	227	43	31	20	94	41
9	Maluku Tenggara	97	28	25	22	75	77
10	Seram Bagian Barat	154	34	22	35	91	59
11	Seram Bagian Timur	29	-	-	-	0	0
TOTAL		1,289	376	277	208	861	67

- 6) Indikator Jumlah Siswa SMA/SMK/SLB Penerima Bantuan Beasiswa Miskin pada tahun 2024 memiliki target sebesar 1.250

siswa dengan realisasi sebesar 1.249 siswa dengan rata-rata capaian sebesar 99.92%. Indikator ini dinyatakan berhasil. Diharapkan kedepannya jumlah siswa miskin yang mendapatkan beasiswa pada jenjang SMA/SMK/SLB semakin meningkat, sehingga dapat meningkatkan angka partisipas sekolah serta menurunkan angka putus sekolah dan angkat tidak sekolah di Provinsi Maluku. Hal ini membutuhkan Upaya serta kerja keras dan Kerjasama semua pihak dalam hal penuntasan angka putus sekolah dan angka tidak sekolah menjadi 0% serta meningkatkan taraf hidup manusia dan perekonomian di Provinsi Maluku kedepan.

- 7) Menurunnya Angka Putus Sekolah SMA/SMK pada tahun 2024 di targetkan pada angka 0,04% dengan realisasinya adalah 0.87% dengan rata-rata capaian adalah 4.60%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, maka jumlah siswa putus sekolah pada 2024 mengalami penurunan sebesar **3.07%**. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), jumlah siswa putus sekolah di SMA/SMK di Maluku tahun 2024 berjumlah 810 siswa yang tersebar di 11 kab/kota turun sekitar 992 siswa. Realisasi ini belum berhasil karena masih terdapat siswa yang putus sekolah. Hal ini harus dan membutuhkan perhatian yang sangat serius dari pada pemangku kebijakan/*Stakeholder* dalam hal penuntasan angka putus sekolah SMA/SMK di Provinsi Maluku. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku telah melakukan berbagai kebijakan dengan membuat program dan kegiatan untuk mengatasi hal ini, seperti Penyiapan beasiswa miskin. Serta kebijakan perluasan akses anak yang secara kemampuan ekonomi orang tua masih dibawah rata-rata dengan instrument BOPPD, BSM dan KMC. Hal ini menandakan dibutuhkan upaya lebih dari *stakeholder* dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak terkait untuk mampu menurunkan angka putus sekolah SMA/SMK dengan optimalisasi memperkuat Satuan Pendidikan dengan terus mendata serta mengelola dana BOS serta bantuan beasiswa miskin dengan lebih efektif dan tepat sasaran sehingga mampu menjawab kebutuhan siswa miskin. Meningkatnya angka putus sekolah SMA/SMK dapat dilihat pada Gambar 5 Sebagai berikut :

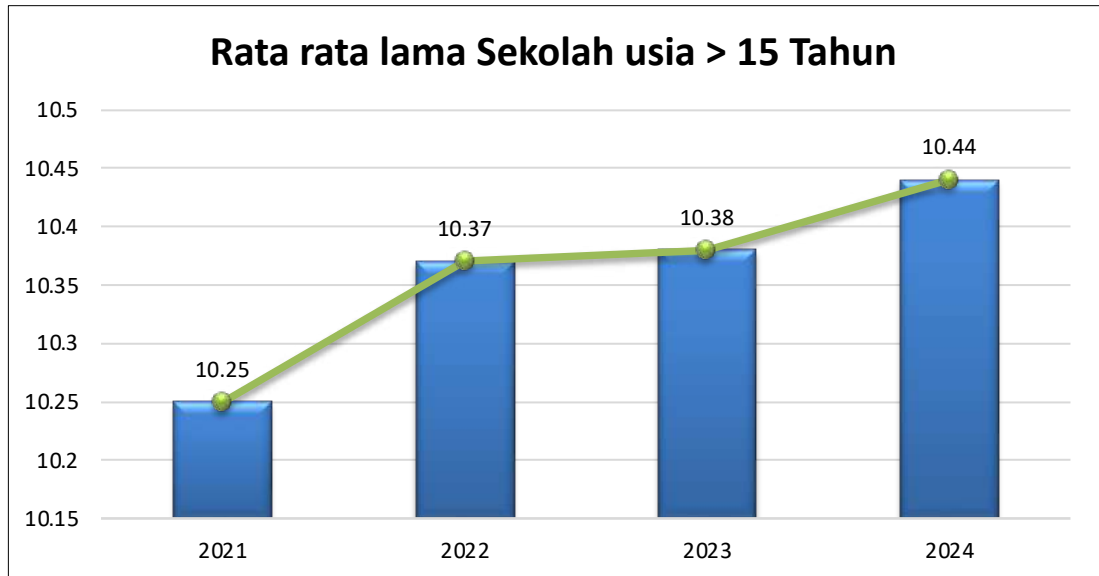
Gambar 5
Angka Putus Sekolah SMA/SMK
Provinsi Maluku



- 8) Indikator Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia > 15 Tahun pada tahun 2024 memiliki target sebesar 12.10 tahun dengan realisasi terhadap target sebesar 10,44 Tahun, sedangkan rata rata capaian berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target adalah 86,28%. Jika dibandingkan tahun 2023 dengan realisasi mencapai 10,38 Tahun, maka terjadi peningkatan realisasi pada tahun 2024 sebesar 0,06 Tahun. Hal ini menandakan bahwa rata-rata penduduk usia > 15 tahun mengenyam Pendidikan sampai jenjang SMA/Sederajat Kelas x di Provinsi Maluku pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan adanya kenaikan pada kualifikasi dan kapasitas sumber daya manusia di Provinsi Maluku.

Namun, meskipun mengalami peningkatan rata-rata belum menyelesaikan 12 tahun Pendidikan dasar sehingga menjadi perhatian penting bagi seluruh pemangku kepentingan atau *Stakeholder* khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku serta Dinas/Badan/Bagian baik Kota maupun Kabupaten untuk dapat berjibaku meningkatkan kualitas serta kuantitas Pendidikan di Maluku serta angka partisipasi sekolah, mengurangi bahkan menghentikan angka tidak sekolah dan angka putus sekolah, sehingga kedepannya seluruh masyarakat baik miskin maupun kaya mampu menyelesaikan Pendidikan hingga keperguruan tinggi dengan menyiapkan kebijakan-kebijakan yang efisien dan tepat sasaran. Rata rata lama sekolah pada tahun 2024 di perbandingkan dengan tahun tahun sebelumnya dapat di lihat pada gambar 6 berikut ini:

Gambar 6
Realisasi Rata rata Lama Sekolah (RLS) Usia > 15 Tahun
Provinsi Maluku



- 9) Indikator proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Atas memiliki target, realisasi dan capaian pada tahun 2024 sebagai berikut:
- Target literasi = skor 60.73, realisasi = 46.6 dengan capaian 76.73%. Pada tahun 2023 kemampuan literasi pada jenjang SMA mendapatkan skor 29.23 sementara tahun 2024 mendapatkan skor 46.6 naik sebesar 17.37.
 - Target numerasi = skor 51.14, realisasi = 49.17 dengan capaian = 96.15%. Untuk numerasi jenjang SMA pada tahun 2024 mendapatkan skor sebesar 49.17 naik sebesar 22.44 dari tahun 2023 sebesar 26,73.

Terjadi peningkatan yang cukup signifikan antara realisasi tahun 2023 dan 2024. Hal ini dikarenakan kemampuan literasi dan numerasi siswa SMA pada pelaksanaan ANBK 2024 mendapatkan peningkatan skor dan naik ke kategori sedang. Meski mengalami peningkatan, namun kemampuan literasi dan numerasi membaca dan menghitung pada kalangan siswa jenjang SMA masih sangat rendah sehingga dibutuhkan Upaya dari berbagai pihak terkait terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, sehingga Tahun 2025 capaian Rapor Pendidikan bisa meningkat dari sedang menjadi baik. Berdasarkan hasil rapor ini maka dibutuhkan Upaya yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya serta pihak-pihak yang terkait adalah dengan mengatasi akar masalah yang

memengaruhi capaian numerasi dan literasi, antara lain : belum adanya Data Peta Kebutuhan PTK, kurangnya kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan Peningkatan Indeks Distribusi Guru, kurangnya Indeks Distribusi Guru, belum adanya data Proporsi PTK bersertifikat, belum adanya data kecukupan Buku Teks dan Non Teks yang berkualitas, belum adanya data PTK yang mengikuti pelatihan TIK, belum adanya data proporsi Guru Penggerak yang diangkat menjadi KS/PS, belum adanya data jumlah pengawas yang berasal dari program Guru Penggerak dan Pendidikan Calon Pengawa . Jika semua akar masalah diatas telah teratasi maka kualitas pembelajaran pun dapat meningkat.

- 10) Indikator proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Kejuruan memiliki target, realisasi dan capaian sebagai berikut :
- a. Target literasi = skor 57.79, realisasi = skor 40.06 dengan capaian = 63.32. Pada tahun 2024 kemampuan literasi pada jenjang SMK mendapatkan skor sebesar 40.06 sementara realisasi pada tahun 2023 adalah 22,87 naik sebesar 17.19 dari tahun 2023
 - b. numerasi = skor 49.83 dengan realisasi = skor 44 dengan capaian = 88.30. Untuk numerasi jenjang SMK pada tahun 2024 mendapatkan skor sebesar 44 naik sebesar 21.18 dibandingkan skor numerasi pada tahun 2023 sebesar 22.82.

Skor literasi dan numerasi pada Jenjang SMK mendapatkan warna merah yang artinya kemampuan literasi dan numerasi siswa SMK tahun 2024 masih kurang. Kurangnya kemampuan literasi dan numerasi jenjang SMK dikarenakan Tingkat membaca serta menghitung siswa jenjang SMK masih sangat rendah sehingga dibutuhkan Upaya dari berbagai pihak terkait terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Berdasarkan hasil rapor ini maka dibutuhkan Upaya yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya serta pihak-pihak yang terkait adalah dengan mengatasi akar masalah yang memengaruhi capaian numerasi dan literasi, antara lain : Menyediakan peta kebutuhan PTK, menyediakan formasi guru ASN, kualitas pembelajaran, distribusi guru, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, proporsi PTK Penggerak, Kecukupan Buku Teks dan Non Teks yang Berkualitas, pelatihan bagi PTK serta kualitas pembelajaran disekolah.

Jika semua akar masalah diatas telah teratasi maka kualitas pembelajaran pun dapat meningkat.

11) Indikator proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Pendidikan Khusus memiliki target, realisasi dan capaian sebagai berikut :

- a. Target literasi = skor 54.23, literasi = skor 69.44 dengan capaian = 128.05%. Pada Tahun 2024 realisasi skor rapor literasi Jenjang Pendidikan Khusus adalah sebesar 69.44 naik sebesar 39.38 dibandingkan tahun 2023 dengan skor 30.06.
- b. Target numerasi = skor 60.95, realisasi = skor 58.33 dengan capaian = 95.70%. Kemampuan numerasi tahun 2024 mendapatkan skor 58.33 naik 8.33 dibandingkan skor tahun 2023 sebesar 50.

Pada skor literasi dan numerasi Pendidikan Khusus tahun 2024 mendapatkan kategori sedang. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan jika dilihat dari target terhadap realisasi, hanya saja pada jenjang SDLB mendapatka skor yang 0 dengan kategori kurang. Sementara SMPLB dan SMALB mendapatkan skor 100 dengan kategori baik.

Penurunan ini didapatkan karena pada tahun 2023 jenjang SDLB, SLB baik negeri maupun swasta tidak mengikuti Asesmen Nasional dikarenakan ketunaan yang tidak memenuhi syarat mengikuti ANBK. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penjarangan siswa disabilitas yang dilakukan oleh 16 SLB di Provinsi Maluku, melakukan sosialisasi ke rumah warga yang memiliki anak disabilitas serta Dinas Pendidikan menyediakan Bantuan Siswa Miskin, KMC, BOPPD serta Dana BOSP sebagai Upaya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah siswa disabilitas serta mengurangi angka tidak sekolah penyandang disabilitas serta melakukan distribusi guru. Diharapkan dengan Upaya-upaya yang terus dilakukan dapat meningkatkan skor rapor Pendidikan Pendidikan Khusus.

12) Indikator Proporsi Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang memiliki Indeks Karakter dengan target skor pada tahun 2024 sebesar 65. Pada tahun 2024 sudah tidak menggunakan indeks sebagai nilai pada Rapor Pendidikan, sehingga Indeks karakter berubah menjadi skor. Pada tahun 2024 realisasi skor sebesar 53.87 naik sebesar 0.87 dibandingkan skor rapor tahun 2023 dengan realisasi skor sebesar 53. Kenaikan ini merupakan Upaya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Upaya untuk meningkatkan Pendidikan karakter disekolah sehingga

Peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari.

a. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam konteks analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) maka sasaran strategis Meningkatnya akses layanan Pendidikan menengah dan khusus secara berkualitas dan merata di kelola oleh 3 (tiga) bidang teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yaitu Bidang Pembinaan SMA dengan jumlah ASN sebanyak 14 Orang, Bidang Pembinaan SMK sebanyak 11 orang dan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus sebanyak 11 orang. Jika dilihat dari Anjab dan ABK, maka jumlah ASN pada ketiga Bidang ini sudah sangat efektif dengan tupoksi masing-masing yang sudah sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga program dan kegiatan dapat berjalan meskipun ada beberapa yang belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan beberapa masalah. Diharapkan kedepan adanya pemberian pelatihan pegawai dalam hal IT guna mendukung laju perkembangan Pendidikan saat ini serta pemberian bahan dan alat dukung kerja guna mendukung kinerja ASN. Aparatur yang ada tetap fokus pada pengelolaan program dan kegiatan yang efektif dan tepat sasaran guna memenuhi capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Efisiensi sumber daya manusia dengan jumlah personil yang tersedia dengan distribusi fungsi yang jelas terhadap aparatur yang menangani program dan kegiatan, dapat berdampak terhadap capaian sasaran strategis ini.

d. Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran

Untuk menunjang keberhasilan dari sasaran strategis ini maka terdapat program yang menunjang kinerja pencapaian setiap indikator yang ditetapkan pada Tabel 24 sebagai berikut :

Tabel 24

Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran Meningkatnya akses layanan Pendidikan menengah dan khusus secara berkualitas dan merata

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
I	Program Pengelolaan Pendidikan		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	17,780,782,000.00	16,381,241,285
2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2,649,435,000.00	2,372,790,805

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1,930,368,000.00	1,865,457,700
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8,435,319,599.00	6,027,897,100
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	34,836,165,913.00	31,494,894,280
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4,643,025,997.00	4,287,038,750
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	2,436,937,000.00	2,135,654,600
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	1,424,826,000.00	1,375,153,800
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	1,148,397,000.00	1,028,654,250
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	210,694,000.00	205,150,500
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	3,999,517,000.00	3,514,847,325
12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	886,466,541.00	885,555,000
13	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	19,203,341,903.00	17,872,921,335
14	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	991,729,000.00	943,195,470
15	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	1,181,386,000.00	818,275,000
16	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	137,939,150,000	137,739,205,893
17	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9,669,878,015	5,062,817,920
18	Pembangunan Ruang Laboratorium	22,079,964,782	19,937,511,370
19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	3,081,797,376	2,481,503,460
20	Pembangunan Ruang Kelas Baru	7,301,293,191	5,485,492,125
21	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1,018,388,682	527,307,840
II	Program Pengelolaan Pendidikan		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
1	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	18,055,485,000	16,340,591,671
2	Pembangunan Ruang Laboratorium	35,901,763,000	32,190,237,298

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2,579,675,000	2,267,171,590
4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1,630,736,000	1,565,013,889
5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12,506,030,000	11,010,405,233
6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	42,789,940,000	40,069,600,182
7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	7,190,615,804	3,915,877,544
8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	537,742,000	357,818,520
9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	50,320,110,000	50,269,198,129
10	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	2,544,112,269	1,821,156,936
11	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4,831,584,000	4,024,722,255
12	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,241,178,000	1,195,212,750
13	Pembangunan Ruang Kelas Baru	9,146,896,000	8,582,138,612
14	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	50,320,110,000	50,269,198,129
II	Program Pengelolaan Pendidikan		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Khusus		
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	394,600,000	389,212,654
2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	465,300,000	357,207,915
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	316,535,000	186,818,258
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	18,830,886,150	17,712,136,840
5	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	982,100,000	948,990,803
6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	4,565,959,000	4,338,371,300
7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	519,782,050	517,798,500
8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1,792,407,000	1,762,956,440
9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	583,771,400	582,817,400

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
10	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	2,850,594,552	1,528,453,141

Guna meningkatkan sasaran Meningkatnya akses layanan Pendidikan menengah dan khusus secara berkualitas dan merata maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku didukung dengan 1 Program, 3 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan meningkatkan Pembangunan dan pemeliharaan sarpras, peningkatan kualitas peserta didik dengan memberikan bantuan bagi peserta didik serta peningkatan kelembagaan dan manajemen sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah, menurunkan angka putus sekolah dan angka tidak sekolah, menambah daya tampung sekolah sehingga daya serap siswa semakin banyak serta meningkatkan kreativitas peserta didik baik seni dan olahraga dengan FLS2N, O2SN, LKSN dan Fiksi. Anggaran yang digunakan berasal dari APBD dan APBN.

SASARAN 3

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang merata

Tabel 25

Capaian Sasaran Peningkatan mutu Pendidik dan tenaga kependidikan SMA/SMK dan SLB yang merata

Sasaran	3	Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang merata		
		dengan indikator kinerja, target kinerja, sebagai berikut:		
Indikator Kinerja		Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional pada Jenjang Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus	50%	31.60	63.20
2	Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Siswa Pendidikan Menengah	1:13	1:9	144.44

	Rata-rata Capaian	103.82
--	--------------------------	---------------

Sasaran terwujudnya Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan SMA/SMK dan SLB yang merata bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya pendidik dengan penguasaan pada kompetensi sosial, kepribadian, professional dan pedagogis (Ilmu Pendidikan). Pada sasaran 3 ini terdapat 2 indikator dimana capaian realisasi terhadap target pada tahun 2024 sebesar 103,82%. Jika di dilihat dari bobot nilai yang didapatkan, maka sasaran ini mendapatkan kategori penilaian **AA**. Ketercapaian sasaran ini dapat di ukur melalui 2 (dua) indicator kinerja yang telah di tetapkan dengan penjelasan analisisnya adalah sebagai berikut :

Tabel 26
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3
antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja		2023		2024	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional pada Jenjang Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus	33,02	50,81	31.60	63.20
2	Rasio Ketersedian Guru Terhadap Siswa Pendidikan Menengah	1:13	153,85	1:13	144.44

Tabel 27
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3
Tahun 2023 dan 2024 serta Tahun Akhir periode RENSTRA

Indikator Kinerja		Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2024
1	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional pada	33,02%	31.60	50%

	Jenjang Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus			
2	Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Siswa Pendidikan Menengah	1:13	1:9	1:13

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pada analisis ini maka berdasarkan indicator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024, maka terdapat beberapa indikator yang memenuhi target. Analisis terhadap setiap indikator dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1) Indikator Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional pada Jenjang Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus pada tahun 2024 di targetkan 50% dengan realisasasi 31.60% dengan capaian sebesar 63.20%. Realisasi didapat dari total keseluruhan guru dan tenaga kependidikan bersertifikat dibagi total guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB di 11 Kab/Kota di Provinsi Maluku tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang memiliki realisasi sebesar 33.02%, maka pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1.42%. Realisasi yang pada tahun 2024 dikategorikan tidak berhasil. Penurunan realisasi ini terjadi dikarenakan beberapa hal, seperti pensiun, penambahan guru seperti GTY, PPPK serta persyaratan mendapatkan sertifikasi yang dinilai cukup sulit pada tahun 2024 sehingga berdampak pada persentase guru bersertifikasi. Syarat untuk menjadi guru sertifikasi, antara lain : 1). Min. sudah bertugas 3 tahun, 2). PNS/Non PNS, 3). Memiliki NIP/NUPTK, 4). Jam Mengajar Utama Min. 2 jam keatas, 5). Linear antara Ijazah terakhir dgn Mapel yang diampu. Untuk peraturan mengenai teknis pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2024 didasarkan pada daftar tunggu berdasarkan umur max. 59 tahun dengan prioritas berusia 58 tahun. Kemudian setelah syarat sudah terpenuhi maka akan diadakan pelatihan dimana jumlah guru/tenaga kependidikan berdasarkan pada LPTK/Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan berdasarkan kelas yang ada dengan 2 mode yakni offline dan online/daring.

Total jumlah guru dan tenaga kependidikan Menengah dan khusus yang bersertifikasi pada tahun 2024 berjumlah 3.400 orang dari total guru dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Menengah dan Khusus di Provinsi Maluku pada tahun 2024 adalah 10.759 orang. Indikator persentase guru SMA/SMK/SLB yang memenuhi kompetensi ini dianggap belum berhasil,

sehingga sangat dibutuhkan dorongan dari pemerintah provinsi Maluku dalam memperluas akses bagi guru dan tenaga kependidikan dengan mempersiapkan program simulasi baik itu pelatihan maupun diklat teknis serta perlu meningkatkan upaya untuk mendorong peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan Menengah dan Khusus yang professional oleh Pemerintah Provinsi Maluku khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Sebaran guru dan tenaga kependidikan bersertifikasi di 11 Kab/Kota Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 28 dibawah ini:

Tabel 28
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional pada
Jenjang Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus
di Provinsi Maluku Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMA/SMK/SLB	JUMLAH GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERSERTIFIKAT	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5
1	Kab. Maluku Tengah	2,442	718	29.40
2	Kota Ambon	2,193	946	43.14
3	Kab. Seram Bagian Barat	1,466	365	24.90
4	Kab. Kepulauan Tanimbar	834	275	32.97
5	Kab. Buru	733	261	35.61
6	Kab. Seram Bagian Timur	558	108	19.35
7	Kab. Maluku Tenggara	643	214	33.28
8	Kab. Kepulauan Aru	427	126	29.51
9	Kab. Maluku Barat Daya	614	145	23.62
10	Kab. Buru Selatan	460	98	21.30
11	Kota Tual	389	144	37.02
Total		10,759	3,400	31.60

- 1) Indikator Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Siswa Pendidikan Menengah pada tahun 2024 di targetkan 1:13 dimana rata rata 1 guru menghadapi 13 Siswa, yang realisasi terhadap target adalah 1:9 atau rata rata 1 guru menghadapi 9 siswa dengan capaian antara realisasi di bandingkan target adalah 144.44%. Terjadi Penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023, dikarenakan terjadinya perubahan target dari yang sebelumnya 1:20 menjadi 1:13. Penurunan ini juga dikarenakan menurunnya jumlah siswa SMA/SMK pada tahun 2024 sebanyak 11.196 juga penurunan jumlah guru sebanyak 62 guru. Penurunan jumlah siswa ini juga sangat berkaitan erat dengan menurunnya angka partisipasi sekolah pada Jenjang SMA /SMK di Maluku pada Tahun 2024. Meskipun mengalami penurunan, jika dilihat dari realisasinya maka indikator ini dinyatakan sangat berhasil jika dilihat dari rasio guru terhadap siswa. Keberhasilan ini merupakan Upaya dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi Maluku,

hususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang berhasil dalam memenuhi kebutuhan guru di Provinsi Maluku khususnya pada Jenjang SMA dan SMK. Diharapkan kedepan adanya Solusi serta regulasi dan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan partisipasi penduduk usia sekolah terutama Jenjang SMP/ sederajat untuk dapat melanjutkan ke Jenjang lebih tinggi serta menekan ATK dan APS di Provinsi Maluku. Sebaran rasio guru per siswa dapat di lihat pada tabel berikut 29 berikut ini :

Tabel 29
Rasio Ketersedian Guru Terhadap Siswa
Pendidikan Menengah Provinsi Maluku Tahun 2024

No	KABUPATEN/KOTA	GURU SMA/SMK			JUMLAH SISWA SMA/SMK			RASIO GURU : SISWA		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH			
1	Kab. Maluku Tengah	527	1,464	1,991	9,144	8,513	17,657	1	:	9
2	Kota Ambon	472	1,329	1,801	10,471	9,851	20,322	1	:	11
3	Kab. Seram Bagian Barat	399	806	1,205	1,144	4,815	5,959	1	:	5
4	Kab. Seram Bagian Timur	183	297	480	785	2,533	3,318	1	:	7
5	Kab. Buru	245	406	651	3,410	3,317	6,727	1	:	10
6	Kab. Kepulauan Tanimbar	249	449	698	3,250	849	4,099	1	:	6
7	Kab. Buru Selatan	152	245	397	2,022	1,901	3,923	1	:	10
8	Kab. Maluku Barat Daya	177	351	528	2,277	2,320	4,597	1	:	9
9	Kab. Maluku Tenggara	184	370	554	1,826	2,451	4,277	1	:	8
10	Kab. Kepulauan Aru	119	263	382	2,367	2,255	4,622	1	:	12
11	Kota Tual	119	236	355	2,036	2,124	4,160	1	:	12
Total		2,826	6,216	9,042	38,732	40,929	79,661	1	:	9

b. Analisis atas efisiensi Penggunaan SDM

Dalam konteks analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) maka sasaran strategis terwujudnya peningkatan kompetensi Pendidik di kelola oleh 1 (satu) bidang teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yaitu Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dengan jumlah aparatur yaitu sebanyak 22 orang. Aparatur yang ada kemudian diberikan tupoksi sesuai dengan Jabatan masing-masing untuk mengelola Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA/SMK/SLB yang ada di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Jumlah ini sudah sangat efektif jika dilihat dari beban kerja yang ada pada Bidang GTK. Aparatur tetap fokus pada pengelolaan program dan kegiatan yang efektif dan tepat sasaran guna memenuhi capaian sasaran strategis yang telah di tetapkan. Efisiensi sumber daya manusia dengan jumlah personil yang tersedia dengan distribusi fungsi yang jelas terhadap aparatur yang menangani program dan kegiatan.

e. Analis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang keberhasilan dari sasaran strategis ini maka terdapat program yang menunjang kinerja pencapaian setiap indicator yang di tetapkan pada Tabel 30 sebagai berikut :

Tabel 30
Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SLB yang merata

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
I	Program Pengelolaan Pendidikan		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	7,900,000	7,900,000
II	Program Pengelolaan Pendidikan		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	4,449,524,000	4,338,280,000
II	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi		
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	20,985,048,040	20,151,379,740

Untuk menunjang sasaran Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang merata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku melaksanakan 3 program, 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Dalam pelaksanaannya didukung anggaran yang berasal dari APBD mencakup pengembangan karir Pendidik yakni pemberian pelatihan kepada guru serta penataan pendistribusian guru berdasarkan kebutuhan dan Mata Pelajaran yang diajarkan. Sampai saat pendistribusian guru masih menjadi masalah dikarenakan tidak meratanya distribusi guru, sehingga banyak sekolah yang memiliki guru berlebih serta ada sekolah yang kekurangan guru serta kurangnya guru PLB di Provinsi Maluku. Upaya yang dilakukan sampai saat ini adalah melakukan distribusi guru, sehingga merata serta kebutuhan guru dapat terpenuhi disemua sekolah.

SASARAN 4

Meningkatnya identitas budaya Maluku melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan

Tabel 31

Capaian Sasaran Meningkatkan identitas budaya Maluku melalui pelestarian dan Pengembangan kebudayaan

Sasaran	4	Meningkatnya identitas budaya Maluku melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan		
		dengan indikator kinerja, target kinerja, sebagai berikut:		
Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Cagar Budaya Tak benda dan Benda yang di lestarikan	15 Cagar Budaya	15 Cagar Budaya	100
2	Jumlah Event Penyelenggaraan Festival Seni Daerah	14 Event	10 Event	71.43
3	Jumlah Pelaku Budaya yang berperan Aktif	15 Orang	15 orang	100
Rata-rata Capaian		90.48%		

Sasaran Meningkatkan identitas budaya Maluku melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan bertujuan untuk pengembangan nilai dan jati diri Maluku sebagai bagian dari Bangsa Indonesia. Ketercapaian sasaran ini dapat di ukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang memiliki rata-rata capaian sebesar 90.48% dengan kategori penilaian **AA**. Kemudian telah di tetapkan dengan penjelasan analisisnya adalah sebagai berikut :

Tabel 32

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4 antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja		2023		2024	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Jumlah Cagar Budaya Tak benda dan Benda yang di lestarikan	10 Cagar Budaya	71,43%	15 Cagar Budaya	100%
2	Jumlah Event Penyelenggaraan Festival Seni Daerah	14 Event	155,56%	10 Event	71.43%

3	Jumlah Pelaku Budaya yang berperan Aktif	10 orang	27,28%.	15 orang	100%
---	--	----------	---------	----------	------

Tabel 33
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4
Tahun 2023 dan 2024 serta Tahun Akhir periode RENSTRA

Indikator Kinerja		Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2024
1	Jumlah Cagar Budaya Tak benda dan Benda yang di lestarikan	10 Cagar Budaya	15 Cagar Budaya	15 Cagar Budaya
2	Jumlah Event Penyelenggaraan Festival Seni Daerah	14 Event	10 event	14 Event
3	Jumlah Pelaku Budaya yang berperan Aktif	10 orang	15 orang	15 orang

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pengembangan kesenian daerah sebagai bentuk dukungan untuk memperluas apresiasi dan kualitas budaya di Maluku dapat di laksanakan dengan menyediakan sarana dan prasarana kesenian serta event kesenian daerah yang dapat di analisis dalam indicator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah Cagar Budaya Tak benda dan Benda yang di lestarikan, pada tahun 2024 di targetkan 15 Cagar Budaya dengan realisasi sebesar 15 Cagar Budaya yang dilestarikan di Provinsi Maluku. Jika dibandingkan antara target dan realisasi maka capaian adalah 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, maka terjadi peningkatan 5 Cagar Budaya. Peningkatan ini merupakan Upaya dari Pemerintah Provinsi Maluku khususnya Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Maluku dalam upaya untuk terus melestarikan Cagar Budaya yang ada di Provinsi Maluku. Pelestarian ini akan terus dilakukan guna melindungi cagar budaya benda dan tak benda yang ada di Provinsi Maluku, tentunya dengan kesungguhan semua pihak terkait khususnya Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi maluku untuk dapat melestarikan kebudayaan yang ada. Berikut di gambaran sebaran cagar budaya di setiap kabupaten/kota sebagai pada tabel 34 berikut ini:

Tabel 34
Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan
Provinsi Maluku Tahun 2024

NO	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Bentuk Pelestarian
1	<u>Gedung Diorama Benteng Duurstede</u>	<u>Desa Saparua Kab. Maluku Tengah</u>	<u>Bangunan</u>	<u>Penempatan Juru Pelihara</u>
2	<u>Gedung Diorama Benteng Duurstede</u>	<u>Desa Saparua Kab. Maluku Tengah</u>	<u>Bangunan</u>	<u>Penempatan Juru Pelihara</u>
3	<u>Istana Mini</u>	<u>Desa Neira Kab. Maluku Tengah</u>	<u>Situs</u>	<u>Penempatan Juru Pelihara</u>
4	<u>Kubu Pertahanan Hatumete</u>	<u>Desa Lumoli/ SBB</u>	<u>Situs</u>	<u>Penempatan Juru Pelihara</u>
5	<u>Situs Lukisan Cadas</u>	<u>Desa Wahai/ Maluku Tengah</u>	<u>Situs</u>	<u>Penempatan Juru Pelihara</u>
6	<u>Benteng Gasewowo</u>	<u>Geser, SBT</u>	<u>Situs</u>	<u>Penempatan Juru Pelihara</u>
7	<u>Gereja Tua Tifu</u>	<u>Desa Tifu, Buru Selatan</u>	<u>Bangunan</u>	<u>Penempatan Juru Pelihara</u>
8	<u>Benteng Beverwiijk</u>	<u>Desa Sila Kab. Maluku Tengah</u>	<u>Bangunan</u>	<u>Penempatan Juru Pelihara</u>
9	<u>Masiud Tua Tayando</u>	<u>Desa Tayando/ Kota Tual</u>	<u>Bangunan</u>	<u>Penempatan Juru Pelihara</u>
10	<u>Situs Lukisan Cadas</u>	<u>Ohoidetwan/ Maluku Tenggara</u>	<u>Situs</u>	<u>Penempatan Juru Pelihara</u>
11	<u>Lutur Soli</u>	<u>Desa sangliat dol/ KKT</u>	<u>Benda</u>	<u>Penempatan Juru Pelihara</u>
12	<u>Gereja Tua</u>	<u>Desa Batu Merah Kab.MBD</u>	<u>Bangunan</u>	<u>Penempatan Juru Pelihara</u>
13	<u>Benteng Wawane</u>	<u>Desa Seith, Kab. Maluku Tengah</u>	<u>Situs</u>	<u>Penempatan Juru Pelihara</u>
14	<u>Gereja Beth Eden</u>	<u>Desa Ameth, Kab. Maluku Tengah</u>	<u>Bangunan</u>	<u>Penempatan Juru Pelihara</u>
15	<u>Benteng Reyengie</u>	<u>Pulau Ay, Kab. Maluku Tengah</u>	<u>Bangunan</u>	<u>Penempatan Juru Pelihara</u>

2. Indikator Jumlah Event Penyelenggaraan Festival Seni Daerah, pada tahun 2024 di targetkan 14 festival event dengan realisasi 10 Event Festival Seni Daerah. Jika dibandingkan antara target dan realisasi maka rata rata capaian adalah 71.43%. Jika dibandingkan tahun 2023 dengan realisasi sebesar 14 event, maka terjadi penurunan sebesar 4 Event. Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan anggaran pada tahun 2024, sehingga kegiatan yang dilaksanakan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jika dilihat antara target dan realisasi, maka indikator ini dinyatakan cukup berhasil. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran seluruh pihak khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi maluku untuk mengembangkan, melestarikan serta mempromosikan festival kebudayaan kepada masyarakat. Berikut di gambaran event festival event seni daerah tahun 2024 di Provinsi Maluku sebagaimana pada tabel 35 berikut ini:

Tabel 35
Jumlah Event Festival seni daerah yang dilaksanakan
Provinsi Maluku Tahun 2024

No	Jenis Festival	Event Festival Seni Daerah yang dilaksanakan
1	Tari Lenso	Acara Pembukaan Musrembang RKPD Provinsi Maluku Tahun 2025 dan Rapat Koordinasi ke-4 ASPIKOM International Komunikasi
2	Tahuri	Gelar Seni Antar Sanggar
	Musikalisasi Puisi	
	Sastra	
	Tari Tradisional	
	Nyanyi Solo (Tunggal)	
	Band	
	Tifa Totobuang	
	Tari Modern	
3	Katreji	Temu Karya Taman Budaya
4	Sawat	Ekspresi Ramadhan
	Musik Gambus	
	Qasidah	
	Nyanyi Solo (Tunggal)	
	Band	
5	Sawat	Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia di Aceh
	Tifa Totobuang	
	Tari Kontemporer	
6	Musikalisasi Puisi	Gelar Seni Sastra
	Teater	
7	Sastra	Gelar sastra
8	Tari Modern	Christmas Consort
	Paduan Suara	
	Nyanyi Solo (Tunggal)	
	Band	
9	Seni Lukis	Lomba Lukis Tkt. SD, SMP, SMA dan sederajat se-Kota Ambon
Total		10 Festival

3. Indikator Jumlah Pelaku Budaya yang berperan Aktif, pada tahun 2024 di targetkan 15 pelaku budaya yang berperan aktif dengan realisasi sebanyak 15 orang pelaku budaya yang berperan aktif dengan rata-rata capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 10 orang, maka terjadi peningkatan 5 orang pelaku budaya pada tahun 2024. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan jumlah Cagar Budaya yang dipelihara pada tahun 2024. Selain itu, terdapat 2 orang Pelaku budaya yang menjadi juru pelihara pada Cagar Budaya Gedung Diorama di Desa Saparua Kab. Maluku Tengah yang menjadikan 15 Cagar Budaya dengan 15 orang Juru Pelihara. Hal ini menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk terus berperan aktif untuk memelihara dan melestarikan Cagar Budaya Tak Benda maupun Benda yang ada di Provinsi Maluku. Adanya Juru Pelihara Cagar Budaya menandakan tingkat keaktifan pelaku budaya untuk melindungi dan melestarikan Cagar budaya Benda dan Tak benda di Maluku sudah cukup baik. Adapun Jumlah Pelaku Budaya Tahun 2024 dapat dilihat pada table 36 dibawah ini :

Tabel 36
Jumlah Pelaku Budaya Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan	Nama Cagar Budaya	Lokasi Cagar Budaya
1	2	3	4	5
1	Frans Saija	Juru Pelihara	Gedung Diorama	Desa Saparua Kab. Maluku Tengah
2	Samuel Siahaya	Juru Pelihara	Gedung Diorama	Desa Saparua Kab. Maluku Tengah
3	Afdal Koritelu	Juru Pelihara	Istana Mini	Desa naira Kab. Maluku Tengah
4	Sonny Waas	Juru Pelihara	Kubu Pertahanan Hatumete	Desa Lumoli Kab. SBB
5	Chelsea Aprilia	Juru Pelihara	Situs Lukisan Cadas	Desa Wahai Kab. Maluku Tengah
6	Fandi Tamtelahitu	Juru Pelihara	Benteng Gasewowo	Geser Kab. SBT
7	Maxmilyan Pattiatia	Juru Pelihara	Gereja Tua Hifu	Desa Tifu Kab. Buru Selatan
8	Adri Soselisa	Juru Pelihara	Benteng Beverwiwijk	Desa Sila Kab. Maluku Tengah
9	Abu Samal	Juru Pelihara	Masjid Tua Tayando	Desa Tayando Kota Tual
10	Alif Faar	Juru Pelihara	Situs Lukisan Cadas	Ohoidetwan Kab. Maluku Tenggara
11	Geles Gasperz	Juru Pelihara	Lutur Soli	Desa Sangliat Dol Kab. KKT
12	Markus Surlaly	Juru Pelihara	Gereja Tua	Desa Batu Merah Kab. MBD
13	Imran Abdullah	Juru Pelihara	Benteng Wawane	Desa Seith Kab. Maluku Tengah
14	Marthin S.	Juru Pelihara	Gereja Beth Eden	Desa Ameth Kab. Maluku Tengah
15	Rasip	Juru Pelihara	Benteng Revengie	Pulau Ay Kab. Maluku Tengah

b. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam konteks analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) maka sasaran strategis perlindungan/pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kebudayaan di kelola oleh 1 (satu) bidang teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yaitu Bidang kebudayaan yang berjumlah 12 orang. Jumlah ASN pada Bidang Kebudayaan sudah sangat efektif jika dilihat dari Beban Kerja yang ada. Setiap ASN memiliki tupoksi dan bertanggungjawab pada tugas masing-masing sesuai dengan jabatan. Aparatur yang ada tetap fokus pada pengelolaan program dan kegiatan yang efektif dan tepat sasaran guna memenuhi capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

c. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang keberhasilan dari sasaran strategis ini maka terdapat program yang menunjang kinerja pencapaian setiap indikator yang ditetapkan pada Tabel 37 sebagai berikut :

Tabel 37
Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran Meningkatnya identitas budaya Maluku melalui pelestarian dan Pengembangan kebudayaan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
I	Program Pengembangan Kebudayaan		
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat pelakunya Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1,100,000,000	1,096,707,000
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	6,000,000	6,000,000
II	Program Pengembangan Kesenian Tradisional		
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	77,186,000	24,895,000
2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	428,978,000	420,522,000
3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	203,822,000	189,392,000
III	Program Pembinaan Sejarah		
	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi		
1	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	1,700,500,000	37,500,000
IV	Program Pestaerian dan Pengelolaan cagar Budaya		
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		
1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	1,156,725,063	646,225,063
2	Penetapan Cagar Budaya	1,565,500,000	1,543,135,000

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Kebudayaan dalam menunjang sasaran “Meningkatnya identitas budaya Maluku melalui pelestarian dan Pengembangan kebudayaan” sudah efektif dengan anggaran yang bersumber dari APBD dengan 4 program, 5 Kegiatan dan 8 Sub yang meliputi pengembangan SDM/pelaku budaya, pendaftaran cagar budaya, serta penetapan cagar budaya peringkat provinsi. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku adalah mendorong Kabupaten/Kota serta Masyarakat dan pelaku budaya untuk aktif

dalam melestarikan serta mengembangkan kebudayaan di Provinsi Maluku.

SASARAN 5

Meningkatnya tata kelola organisasi penyelenggara Pendidikan dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan pendidikan

Tabel 38

Capaian Sasaran Meningkatnya tata kelola organisasi penyelenggara Pendidikan dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan Pendidikan

Sasaran	5	Meningkatnya tata kelola organisasi penyelenggara Pendidikan dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan pendidikan		
		dengan indikator kinerja, target kinerja, sebagai berikut		
Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Layanan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
2	Jumlah standar layanan Informasi publik yang tersedia dan bisa di akses secara elektronik maupun non elektronik	8 Layanan	8 Layanan	100
Rata-rata Capaian		100%		

Sasaran Meningkatnya tata kelola organisasi penyelenggara Pendidikan dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan pendidikan memiliki rata-rata capaian pada tahun 2024 sebesar **100%**. Berdasarkan Bobor nilai yang diperoleh, maka sasaran ini mendapatkan kategori **AA**. Melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta dapat melakukan fungsi pelayanan public yang prima serta pelaksanaan tugas pembantuan untuk meningkatnya fungsi pelayanan Pendidikan di tingkat Provinsi Maluku. Ketercapaian sasaran ini dapat di ukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yang telah di tetapkan dengan penjelasan analisisnya adalah sebagai berikut :

Tabel 39
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 5
antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja		2023		2024	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Jumlah Layanan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	4	28.57%	4	100%
2	Jumlah standar layanan Informasi publik yang tersedia dan bisa di akses secara elektronik maupun non elektronik	8	100%	8	100%

Tabel 40
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5
Tahun 2023 dan 2024 serta Tahun Akhir periode RENSTRA

Indikator Kinerja		Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2024
1	Jumlah Layanan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	4	4	4
2	Jumlah standar layanan Informasi publik yang tersedia dan bisa di akses secara elektronik maupun non elektronik	8	8	8

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dapat di lihat dari dukungan manajemen terhadap pelaksanaan program dan pelayanan public yang prima dengan mempertimbangkan kualitas tata kelola organisasi yang bermutu. Hal ini dapat di analisis dalam indicator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah Layanan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2024 ditargetkan sejumlah 4 Kegiatan dengan realisasi sebesar 4 kegiatan dengan capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini didapat dari
$$= \frac{\text{Target}}{\text{Total Layanan Administrasi}} \times 100\%$$
 Realisasi pada tahun 2024 sama dengan realisasi pada tahun 2023. Adapun 4

kegiatan layanan penunjang urusan administrasi yang ada terdapat pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2024.

2. Indikator Jumlah standar layanan Informasi publik yang tersedia dan bisa di akses secara elektronik maupun non elektronik. Pada tahun 2024, indicator ini di targetkan yaitu tersedianya 8 layanan informasi publik yang bisa di akses secara elektronik dengan realisasinya adalah 8 layanan dengan capaian adalah 100%, antara lain : PPDB, Panggayo, Database, Bidang Kebudayaan, Kuesioner Online, Pengaduan Online, Surel : disdikbud_maluku@gmail.com dan Loker Pengaduan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Factor keberhasilan indicator ini karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam kurun waktu tahun 2024 terus memperluas akses layanan informasi baik bagi Guru maupun ASN dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku serta Masyarakat umum guna mengakses informasi yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

b. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam konteks analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) maka sasaran strategis ini di kelola oleh sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang berjumlah 41 orang pada Bidang Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian dan Umum. Jumlah pegawai pada Bidang Perencanaan berjumlah 9 orang dalam melaksanakan tugas dinilai belum efektif jika dilihat dari beban kerja yang ada. Aparatur yang ada tetap focus pada pengelolaan program dan kegiatan yang efektif dan tepat sasaran guna memenuhi capaian sasaran strategis yang telah di tetapkan.

c. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang keberhasilan dari sasaran strategis ini maka terdapat program yang menunjang kinerja pencapaian setiap indicator yang di tetapkan pada Tabel 41 sebagai berikut :

Tabel 41
Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran Meningkatnya
tata kelola organisasi penyelenggara Pendidikan dan manajemen
pendukung tugas pembantuan urusan Pendidikan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	914,579,300	848,142,494
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	74,620,000	66,967,050
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	112,416,000	54,091,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	567,653,587	238,622,800
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	530,426,000	449,754,800
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,072,000,000	1,040,385,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	755,020,000	729,180,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	351,384,835	328,840,000
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	603,156,000	517,796,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1,200,000,000	837,575,069
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	550,000,000	209,796,876
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1,790,828,000	803,806,924
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	250,000,000	249,435,510
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	470,000,000	443,314,200
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	700,000,000	630,529,500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	350,000,000	330,030,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	850,000,000	828,039,600
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3,393,010,650	3,343,021,275
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,787,500,000	1,474,484,500
	Pengadaan Mebel	950,000,000	695,446,700
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,257,607,500	1,282,850,000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200,000,000	181,250,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	750,000,000	433,073,999
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	756,000,000	749,205,330
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,295,804,824	4,168,782,578
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	740,000,000	605,492,674
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	494,000,000	378,293,100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,485,233,100	2,360,683,227

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Upaya meningkatkan sasaran “Meningkatnya tata kelola organisasi penyelenggara Pendidikan dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan Pendidikan” berjumlah 1 Program, 7 kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan anggaran yang bersumber pada DPA OPD tahun 2024.

SASARAN 6

Meningkatnya Layanan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 42

Capaian Sasaran Meningkatkan tata kelola organisasi penyelenggara Pendidikan dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan Pendidikan

Sasaran	6	Meningkatnya Layanan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		
		dengan indikator kinerja, target kinerja, sebagai berikut		
Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	NA	NA
	Rata-rata Capaian	NA		

Penilaian SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku pada tahun N+1 belum dilaksanakan, sehingga belum ada realisasi serta capaiannya. Sementara realisasi serta capaian yang ada hanya pada tahun 2023. Sasaran

Meningkatnya Layanan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah memiliki rata-rata capaian pada tahun 2023 sebesar 100%. Berdasarkan Bobot nilai yang diperoleh, maka sasaran ini mendapatkan kategori **AA**. Ketercapaian sasaran ini dapat diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan penjelasan analisisnya adalah sebagai berikut :

Tabel 43
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 6
antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja		2023		2024	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Meningkatnya Layanan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B	100%	NA	NA

Tabel 44
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 6
Tahun 2023 dan 2024 serta Tahun Akhir periode RENSTRA

Indikator Kinerja		Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2024
1	Meningkatnya Layanan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B	NA	B

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dapat dilihat dari dukungan manajemen terhadap pelaksanaan program dan pelayanan public yang prima dengan mempertimbangkan kualitas tata kelola organisasi yang bermutu. Hal ini dapat di analisis dalam indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Meningkatnya Layanan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ditargetkan B, realisasi B dengan nilai sebesar 67.15 serta capaian kinerja 100%. Sementara pada Tahun N+1 belum dilaksanakan Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Provinsi Maluku. Jika dibandingkan dengan predikat pada tahun 2022, mengalami peningkatan nilai sebesar 5,5. Hal tersebut menunjukkan Implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sudah baik pada beberapa bidang. Namun, masih perlu adanya sedikit perbaikan pada beberapa aspek, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai ke level eselon 2/Kepala Dinas.

Adapun beberapa komponen yang dinilai antara lain :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30, sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mendapatkan nilai 25.80;
2. Pengukuran kinerja dengan bobot 30, sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mendapatkan nilai 19.50;
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 25, sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mendapatkan nilai 11.25; dan
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 25, sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mendapatkan nilai 10.60.

Beberapa penjelasan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku serta rekomendasi yang diberikan untuk peningkatan kinerja akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagai bukti serta Upaya dalam peningkatan Kinerja.

e. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam konteks analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) maka sasaran strategis ini di kelola oleh Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang berjumlah 8 orang pada Bidang Perencanaan. Dalam melaksanakan tugas dinilai belum efektif jika dilihat dari beban kerja yang ada. Aparatur yang ada tetap focus pada pengelolaan program dan kegiatan yang efektif dan tepat sasaran guna memenuhi capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang keberhasilan dari sasaran strategis ini maka terdapat program yang menunjang kinerja pencapaian setiap indikator yang ditetapkan pada Tabel 45 sebagai berikut :

Tabel 45
Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran Meningkatnya Layanan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	914,579,300	914,579,300
	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	74,620,000	74,620,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	112,416,000	112,416,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	567,653,587	567,653,587

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Upaya meningkatkan sasaran “Meningkatnya tata kelola organisasi penyelenggara Pendidikan dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan Pendidikan” berjumlah 1 Program, 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan anggaran yang bersumber pada DPA OPD tahun 2024.

1.2 REALISASI ANGGARAN

Analisis Realisasi Keuangan kami sajikan untuk memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap data keuangan yang disajikan sehingga dapat dimengerti dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari segi Anggaran maka pada tahun 2024 TOTAL PAGU pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebesar **Rp.1.240.379.112.161,-**.

Pada Tahun anggaran 2024 daya serap anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mencapai **95.75%** dengan total realisasi sebesar **Rp.1.187.676.182.064,-**. Realisasi Tahun 2024 terdiri dari Belanja Modal sebesar **Rp.216.193.973.906,-** dan Belanja Operasi sebesar **Rp.1.024.185.138.255,-**. Jika di bandingkan dengan daya serap anggaran tahun 2023 yang mencapai **78,02%**, maka pada tahun 2024 kenaikan daya serap anggaran sebesar **17.73%**.

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER SUB KEGIATAN
Per 31 Desember 2024

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	PAGU	Realisasi	%	Sisa Dana
1				2	3	4	5	6
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,240,379,112,161	1,187,676,182,064	95.75	52,702,930,097
1.01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1,240,379,112,161	1,187,676,182,064	95.75	52,702,930,097
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1,240,379,112,161	1,187,676,182,064	95.75	52,702,930,097
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	702,886,763,534	693,764,336,605	98.70	9,122,426,929
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,199,694,887	1,657,578,144	75.35	542,116,743
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	914,579,300	848,142,494	92.74	66,436,806
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	74,620,000	66,967,050	89.74	7,652,950
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	112,416,000	54,091,000	48.12	58,325,000
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	567,653,587	238,622,800	42.04	329,030,787
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	530,426,000	449,754,800	84.79	80,671,200
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	675,462,543,738	671,255,011,399	99.38	4,207,532,339
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	673,635,523,738	669,485,446,399	99.38	4,150,077,339
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,072,000,000	1,040,385,000	97	31,615,000
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	755,020,000	729,180,000	96.58	25,840,000
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	954,540,835	846,636,000	88.70	107,904,835
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0003		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	351,384,835	328,840,000	93.58	22,544,835
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0004		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	603,156,000	517,796,000	85.85	85,360,000
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3,540,828,000	1,851,178,869	52.28	1,689,649,131
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1,200,000,000	837,575,069	69.80	362,424,931
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	550,000,000	209,796,876	38.14	340,203,124
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1,790,828,000	803,806,924	44.88	987,021,076
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	6,013,010,650	5,824,370,085	96.86	188,640,565
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	250,000,000	249,435,510	99.77	564,490
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	470,000,000	443,314,200	94.32	26,685,800
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	700,000,000	630,529,500	90.08	69,470,500
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	350,000,000	330,030,000	94.29	19,970,000
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	850,000,000	828,039,600	97.42	21,960,400
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3,393,010,650	3,343,021,275	98.53	49,989,375
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,995,107,500	3,452,781,200	69.12	1,542,326,300
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,787,500,000	1,474,484,500	82.49	313,015,500
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel	950,000,000	695,446,700	73.20	254,553,300
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,257,607,500	1,282,850,000	56.82	974,757,500
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,001,804,824	5,532,311,907	92.18	469,492,917
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200,000,000	181,250,000	90.63	18,750,000
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	750,000,000	433,073,999	57.74	316,926,001
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	756,000,000	749,205,330	99.10	6,794,670
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,295,804,824	4,168,782,578	97.04	127,022,246
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,719,233,100	3,344,469,001	89.92	374,764,099
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	740,000,000	605,492,674	81.82	134,507,326
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	494,000,000	378,293,100	76.58	115,706,900
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,485,233,100	2,360,683,227	94.99	124,549,873
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	510,268,589,524	469,796,089,656	92.07	40,472,499,868
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	282,856,762,999	262,450,465,808	92.79	20,406,297,191
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0003		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	17,780,782,000	16,381,241,285	92.13	1,399,540,715
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0010		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2,649,435,000	2,372,790,805	89.56	276,644,195
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0011		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1,930,368,000	1,865,457,700	96.64	64,910,300
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0014		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8,435,319,599	6,027,897,100	71.46	2,407,422,499
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0019		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	34,836,165,913	31,494,894,280	90.41	3,341,271,633
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0020		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4,643,025,997	4,287,038,750	92.33	355,987,247
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0022		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	2,436,937,000	2,135,654,600	87.64	301,282,400
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0023		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	1,424,826,000	1,375,153,800	96.51	49,672,200
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0024		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	1,148,397,000	1,028,654,250	89.57	119,742,750
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0027		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	210,694,000	205,150,500	97.37	5,543,500
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0028		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	3,999,517,000	3,514,847,325	87.88	484,669,675
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0041		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	886,466,541	885,555,000	99.90	911,541
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0045		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	19,203,341,903	17,872,921,335	93.07	1,330,420,568

1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	991,729,000	943,195,470	95.11	48,533,530
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	7,900,000	7,900,000	100.00	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	1,181,386,000	818,275,000	69.26	363,111,000
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	137,939,150,000	137,739,205,893	99.86	199,944,107
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9,669,878,015	5,062,817,920	52.36	4,607,060,095
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	22,079,964,782	19,937,511,370	90.30	2,142,453,412
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Laboratorium	3,081,797,376	2,481,503,460	80.52	600,293,916
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	7,301,293,191	5,485,492,125	75.13	1,815,801,066
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1,018,388,682	527,307,840	51.78	491,080,842
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	196,109,891,373	179,020,860,597	91.29	17,089,030,776
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	18,055,485,000	16,340,591,671	90.50	1,714,893,329
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	35,901,763,000	32,190,237,298	89.66	3,711,525,702
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2,579,675,000	2,267,171,590	87.89	312,503,410
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1,630,736,000	1,565,013,889	95.97	65,722,111
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12,506,030,000	11,010,405,233	88.04	1,495,624,767
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	42,789,940,000	40,069,600,182	93.64	2,720,339,818
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	7,190,615,804	3,915,877,544	54.46	3,274,738,260
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	537,742,000	357,818,520	66.54	179,923,480
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	4,449,524,000	4,338,280,000	97.50	111,244,000
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	2,384,500,300	1,073,435,988	45.02	1,311,064,312
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	50,320,110,000	50,269,198,129	99.90	50,911,871
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2,544,112,269	1,821,156,936	71.58	722,955,333
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4,831,584,000	4,024,722,255	83.30	806,861,745
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1,241,178,000	1,195,212,750	96.30	45,965,250
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	9,146,896,000	8,582,138,612	93.83	564,757,388
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	31,301,935,152	28,324,763,251	90.49	2,977,171,901
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	394,600,000	389,212,654	98.63	5,387,346
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	465,300,000	357,207,915	76.77	108,092,085
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	316,535,000	186,818,258	59.02	129,716,742
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	18,830,886,150	17,712,136,840	94.06	1,118,749,310
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	982,100,000	948,990,803	96.63	33,109,197
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	4,565,959,000	4,338,371,300	95.02	227,587,700
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0045	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	519,782,050	517,798,500	99.62	1,983,550
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1,792,407,000	1,762,956,440	98.36	29,450,560
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	583,771,400	582,817,400	99.84	954,000
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	2,850,594,552	1,528,453,141	53.62	1,322,141,411
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	20,985,048,040	20,151,379,740	96.03	833,668,300
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	20,985,048,040	20,151,379,740	96.03	833,668,300
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	20,985,048,040	20,151,379,740	96.03	833,668,300
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,106,000,000	1,102,707,000	99.70	3,293,000
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,100,000,000	1,096,707,000	99.70	3,293,000
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1,100,000,000	1,096,707,000	99.70	3,293,000
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6,000,000	6,000,000	100.00	-
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	6,000,000	6,000,000	100.00	-
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	709,986,000	634,809,000	89.41	75,177,000
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	709,986,000	634,809,000	89.41	75,177,000
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	77,186,000	24,895,000	32.25	52,291,000
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	428,978,000	420,522,000	98.03	8,456,000
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	203,822,000	189,392,000	92.92	14,430,000
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	1,700,500,000	37,500,000	2.21	1,663,000,000
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	1,700,500,000	37,500,000	2.21	1,663,000,000
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	1,700,500,000	37,500,000	2.21	1,663,000,000
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2,722,225,063	2,189,360,063	80.43	532,865,000
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	2,722,225,063	2,189,360,063	80.43	532,865,000
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	1,156,725,063	646,225,063	55.87	510,500,000
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	1,565,500,000	1,543,135,000	98.57	22,365,000
			Jumlah	1,240,379,112,161	1,187,676,182,064	95.75	52,702,930,097

Penutup

Bab IV

4.1. Tinjauan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Periode Januari s/d Desember 2024 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Dinas kepada Pemerintah Provinsi Maluku. Pelaporan LKIP ini merupakan sarana bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima. Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan seperti telah dijelaskan sebelumnya terdapat banyak kendala dan tantangan, baik disebabkan oleh karena perencanaan yang kurang efektif dan efisien, belum maksimalnya monitoring dan evaluasi, belum meratanya distribusi guru termasuk faktor-faktor yang menyebabkan belum maksimalnya target capaian kinerja pada setiap sasaran, dan apabila dihubungkan dengan target capaian kinerja berdasarkan rencana strategis Perubahan 2019-2024. Target sasaran yang belum tercapai secara maksimal pada periode Rencana Strategis Perubahan 2019-2024 akan menjadi perhatian serius bagi Dinas Pendidikan dan kebudayaan kedepannya.

4.2. Tinjauan Khusus

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada pencapaian sasaran seperti diuraikan dalam BAB sebelumnya, maka dapat dijelaskan bahwa sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 **Tingkat Capaian Kinerja** yang dapat dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebesar **88.52%** dengan Daya Serap Anggaran sebesar **95.75.%. Dari sisi kinerja mengalami peningkatan dibandingkan**

capaian pada tahun 2023 sebesar **0.91%**. Sedangkan Daya Serap Anggaran mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023 sebesar **17.73%**. Adapun hasil yang dicapai merupakan hasil dari usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dengan mengimplementasikan program dan kegiatan dengan baik. Diharapkan kedepannya kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan semakin baik dan meningkat.

Dengan berbagai usaha yang diupayakan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2024, capaian kerja yang dicapai berdasarkan Penilaian dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 dari 6 Sasaran Kinerja mendapatkan kategori penilaian **BB**. Tingkat capaian kinerja ini adalah hasil perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan yang didasarkan pada program kegiatan yang tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD tahun 2024. Tentu hal ini perlu mendapat perhatian serius untuk tahun anggaran berikutnya. Perhatian serius pula harus dilakukan pada sasaran-sasaran yang belum dilaksanakan dari rencanas trategi yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Dikbud 2019-2024. Adapun kami sampaikan data kategori penilaian 6 sasaran yang telah dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku pada tabel dibawah ini :

Tabel 47
Capaian Penilaian Kinerja Tahun 2024

No	Bobot Nilai	Sasaran Kinerja	Kategori Capaian
1	67.38%	Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Pendidikan Vokasi	CC
2	80.92%	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus secara Berkualitas dan Merata	BB
3	103.82%	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang merata	AA
4	90.48%	Meningkatnya Identitas Budaya Maluku melalui Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	A
5	100	Meningkatnya tata kelola organisasi penyelenggara Pendidikan dan manajemen pendukung tugas pembantuan urusan pendidikan	AA
6	NA	Meningkatnya Layanan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	NA

Pada tabel 47 diatas terlihat bahwa Dinas Pendidikan mendapatkan beberapa kategori pada 6 sasaran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, antara lain : 2 AA, 1 A, 1 BB, 1 CC dan 1 NA.

4.3. Saran dan Tindak Lanjut

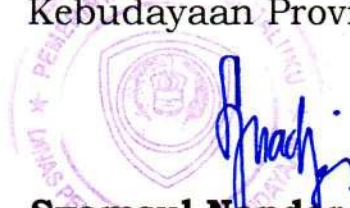
Agar semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan 2019-2024 dapat dicapai secara maksimal maka tentu perlu dilakukan evaluasi menyeluruh setiap sasaran yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan atau pun yang belum tercapai secara maksimal. Seperti telah diuraikan sebelumnya yang merupakan faktor yang turut mempengaruhi pencapaian target adalah perencanaan yang kurang efektif dan efisien, belum maksimalnya monitoring dan evaluasi, belum meratanya distribusi guru, masih rendahnya Angka Partisipasi sekolah dimana masih ada Anak Putus Sekolah, Anak Tidak Sekolah, Letak Geografis, kualitas dan kualifikasi guru, maka yang menjadi saran kami kiranya pembangunan dibidang pendidikan dan kebudayaan hendaknya benar-benar menjadi skala prioritas mulai dari

perencanaan bahkan sampai pelaksanaan dan realisasi anggaran serta perlu membuat peta distribusi guru, peningkatan kualitas dan kualifikasi guru melalui pelatihan/bimtek serta peningkatan bantuan siswa miskin.

Disamping itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku akan berupaya senantiasa mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa datang. Dengan ketercapaian tersebut diharapkan visi dan misi terselenggaranya layanan prima khususnya pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Maluku dapat terealisasi dengan baik.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2024, yang merupakan bahan evaluasi sekaligus sebagai pertanggungjawaban mandat yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sesuai tugas dan fungsinya.

Ambon, Februari 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Maluku,



Syamsul Nandar Joisangadji, S.Pt. M.Si
Pembina Tingkat I – IV.b
NIP. 19701114 199803 1 007

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU**

TAHUN ANGGARAN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Insun Sangadji, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Murad Ismail
Jabatan : Gubernur Maluku
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

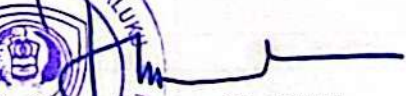
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Tahun 2024 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, Maret 2024

Pihak Kedua,

Murad Ismail
Gubernur Maluku

Pihak Pertama,

Dr. Ir. Insun Sangadji, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196107041992032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Pendidikan Vokasi	Jumlah SMK yang aktif pada pembelajaran teaching factory	65 Sekolah
		Persentase jumlah lulusan SMK yang diterima dunia usaha dan dunia industri	34%
		Persentase SMK yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	11%
2	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus secara Berkualitas dan Merata	APK SMA/SMK/SMLB/Sederajat	84%
		APM SMA/SMK/SMLB/Sederajat	73%
		Persentase jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Atas	60%
		Persentase jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Kejuruan	55%
		Persentase jumlah penduduk disabilitas usia 4 - 18 tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Khusus	60%
		Jumlah Siswa SMA/SMK/SLB Penerima Bantuan Beasiswa Miskin	1.250 Siswa
		Persentase menurunnya angka putus sekolah SMA/SMK/SLB	0.04%
		Rata-rata lama sekolah penduduk Usia > 15 Tahun	12,10 Tahun
		Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Atas	
		a. Literasi	Skor 60,73
		b. Numerasi	Skor 51,14

		Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Kejuruan	
		a. Literasi	Skor 57,79
		b. Numerasi	Skor 49,83
		Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Pendidikan Khusus	
		a. Literasi	Skor 54,23
		b. Numerasi	Skor 60,95
		Proporsi Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang memiliki indeks karakter	Skor 65
3	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang merata	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional pada Jenjang Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus	50%
		Rasio Ketersediaan Guru terhadap Siswa Pendidikan Menengah	1:13
4	Meningkatnya Identitas Budaya Maluku melalui Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya tak benda dan benda yang dilestarikan	15 Cagar Budaya
		Jumlah event penyelenggaraan festival seni daerah	14 event
		Jumlah pelaku budaya yang berperan aktif	15 orang
5	Meningkatnya tata kelola organisasi penyelenggara Pendidikan dan Manajemen pendukung tugas pembantuan urusan pendidikan	Jumlah Kegiatan penunjang urusan administrasi pemerintahan	4 Kegiatan
		Jumlah Layanan informasi publik yang tersedia dan bisa di akses secara elektronik maupun non elektronik	8 Layanan
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 32.188.560.166	APBD
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 525.594.319.854	APBD
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 27.139.781.000	APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 2.683.917.869	APBD
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp 2.750.000.000	APBD
6	Program Pembinaan Sejarah	Rp 2.500.000.000	APBD
7	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp 10.250.000.000	APBD

Gubernur Maluku,

Murad Ismail

Ambon, Maret 2024
 Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Provinsi Maluku,


Dr. Ir. Insan Sangadji, M.Si
 Pembina Tk.I
 NIP. 196107041992032001

Lampiran Keputusan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

Nomor : 000.8-6.3 / 371

Tanggal : 23 April 2024

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2024

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / ALASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
1	Terwujudnya kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Pendidikan Vokasi	Meningkatnya Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Pendidikan Vokasi	Persentase SMK yang aktif pada pembelajaran teaching factory	$= \frac{\text{Jumlah SMK Aktif Teaching Factory}}{\text{Total SMK}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan SMK	Data DAPODIK dan TAKOLA SMK
			Persentase jumlah lulusan SMK yang di terima Dunia Usaha dan Dunia Industri	$= \frac{\text{Jumlah Siswa SMK yg diterima DUDI}}{\text{Total Keseluruhan lulusan SMK}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan SMK	Data DAPODIK dan Data Laporan Prakerin
			Persentase SMK yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	$= \frac{\text{Jumlah SMK yang memiliki LSP}}{\text{Total SMK}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan SMK	Data BNSP
2	Terwujudnya akses layanan Pendidikan Menengah dan	Meningkatnya akses layanan Pendidikan Menengah dan	APK SMA / SMK / SMLB / Sederajat	APK SMA/SMK/SMLB/Sederajat $= \frac{\text{Jumlah Siswa Keseluruhan}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Thn}} \times 100\%$	Bidang SMA/SMK/ PMPK	Data DAPODIK dan Data BPS

	Khusus secara berkualitas dan merata	Khusus secara berkualitas dan merata	APM SMA /SMK/ SMLB/ Sederajat	APM SMA/SMK/SMLB/Sederajat $= \frac{\text{Jumlah Siswa Usia 16 – 18 Thn}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 Thn}} \times 100\%$	Bidang SMA/SMK/ PMPK	Data DAPODIK dan Data BPS
			Persentase Jumlah Penduduka Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Atas	$= \frac{\text{Jumlah Siswa SMA U 16 – 18 Thn}}{\text{Jumlah Penduduk U 16 – 18 Thn}} \times 100\%$	Bidang SMA	Data DAPODIK, Data BPS dan Capil Provinsi Maluku
			Persentase Jumlah Penduduka Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Kejuruan	$= \frac{\text{Jumlah Siswa SMK U 16 – 18 Thn}}{\text{Jumlah Penduduk U 16 – 18 Thn}} \times 100\%$	Bidang SMK	Data DAPODIK, Data BPS dan Capil Provinsi Maluku
			Persentase Jumlah Penduduk Usia 4-18 tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Khusus	$= \frac{\text{Jumlah Siswa SLB U 4 – 18 Thn}}{\text{Jumlah Penduduk U 4 – 18 Thn}} \times 100\%$	Bidang PMPK	Data DAPODIK, Data BPS dan Capil Provinsi Maluku
			Jumlah Siswa SMA/SMK/SLB Penerima Bantuan Beasiswa Miskin	Jumlah siswa miskin SMA/SMK/SLB yang menerima bantuan siswa miskin	Bidang SMA/SMK/P MPK	DPA TA 2024

			Persentase menurunnya Angka Putus Sekolah SMA/SMK	Jumlah siswa SMA/SMK yang putus sekolah dibagi dengan total siswa SMA/SMK dikalikan 100%	Bidang SMA dan SMK	DAPODIK dan Data SPM
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia > 15 Tahun	Lama Penduduk usia > 15 tahun yang menamatkan sekolah dibagi dengan jumlah penduduk usia > 15 tahun	Bidang SMA dan SMK	Data BPS
			Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Atas a. Literasi b. Numerasi	a. Nilai Indeks peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi); b. Nilai Indeks peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	Bidang Pembinaan SMA	Rapor Pendidikan

			Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Menengah Kejuruan a. Literasi b. Numerasi	a. Nilai Indeks peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi); b. Nilai Indeks peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	Bidang Pembinaan SMK	Rapor Pendidikan
			Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Sekolah Pendidikan Khusus a. Literasi b. Numerasi	a. Nilai Indeks peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi); b. Nilai Indeks peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk	Bidang Pembinaan PMPK	Rapor Pendidikan

				menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.		
			Proporsi Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang memiliki Indeks Karakter	Rata-rata nilai karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global dan kemandirian pada survei karakter	Bidang Pembinaan SMA, SMK dan PMPK	Rapor Pendidikan
3	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang merata	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB yang merata	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional pada Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang Bersertifikasi Pendidik dibagi Total Guru dan Tenaga Kependidikan dikali 100%	Bidang GTK	Data DAPODIK
			Rasio ketersediaan guru terhadap siswa Pendidikan Menengah	Jumlah Guru SMA/SMK dibagi jumlah keseluruhan siswa SMA/SMK	Bidang GTK	Data DAPODIK

4	Peningkatan identitas Budaya Maluku melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaanta	Meningkatnya identitas Budaya Maluku melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya Tak Benda dan Benda yang dilestarikan	Jumlah Cagar Budaya Tak Benda dan Benda yang ditetapkan dan dilestarikan pada Tahun 2024	Bidang Kebudayaan	Buku Ikhtisar Data Kebudayaan
			Jumlah Event penyelenggaraan Festival Seni Daerah	Jumlah event seni daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2024	Bidang Kebudayaan	Buku Ikhtisar Data Kebudayaan
			Jumlah Pelaku Budaya yang berperan aktif	Jumlah pelaku budaya yang aktif pada Tahun 2024	Bidang Kebudayaan	Buku Ikhtisar Data Kebudayaan
5	Terwujudnya kualitas tata kelola organisasi penyelenggara Pendidikan dan Manajemen pendukung tugas pembantuan urusan pendidikan	Meningkatnya tata kelola organisasi penyelenggara Pendidikan dan Manajemen pendukung tugas pembantuan urusan pendidikan	Jumlah Kegiatan penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kegiatan penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan pada TA 2024	Subag. Kepegawaian dan Umum, Subag. Keuangan dan Aset dan Kelompok Fungsional Perencanaan dan Tugas Pembantuan	DPA TA 2024
			Jumlah Standar Layanan Informasi Publik yang tersedia dan bisa diakses secara elektronik	Jumlah Layanan publik secara elektronik maupun non elektronik	Sekretariat Dinas	Laporan Kinerja Kegiatan

			maupun non elektronik			
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku	B

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku,



Dr. Ir. Insun Sangadji, M.Si

Pembina Tingkat I/IV-b

NIP. 19610704 199203 2 001